

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia 2013 – 2017)



SKRIPSI

Oleh:

Nurratri Apriliana Kurniasari

15312408

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia 2013 – 2017)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nurratri Apriliana Kurniasari

No. Mahasiswa: 15312408

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 2 September 2021

Penulis,



(Nurrati Apriliana Kurniasari)

Scanned by TapScanner

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia 2013 – 2017)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nurratri Apriliana Kurniasari

No. Mahasiswa: 15312408

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 10 Maret 2021

Dosen Pembimbing



(Marfuah, Dra., M.Si., Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN
TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2013 – 2017)**

Disusun Oleh : **NURRATRI APRILIANA KURNIASARI**

Nomor Mahasiswa : **15312408**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 03 Agustus 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra., M.Si., Ak.



Penguji : Primanita Setyono, Dra., MBA., Ak., CA., Cert.SAP.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam sebagai rahmatan lil'amin.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017)” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang maha pemberi nikmat, rahmat, hidayahnya yang tak terhingga serta pemberi kesempatan dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Ibu Marfuah, Dra., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, ilmu, waktu serta tenaga untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak. Selaku ketua program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya Program Akuntansi atas ilmu yang telah diberikan serta kesempatan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Kepada seluruh keluarga saya. Terimakasih!
9. Teman – teman yang menemani dan menerima saya selama saya berkuliah di Universitas Islam Indonesia
10. Teman - teman di SMA N 1 Sedayu yang selalu mendoakan saya.
11. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam penulisan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

(Nurratri Apriliana Kurniasari)



DAFTAR ISI

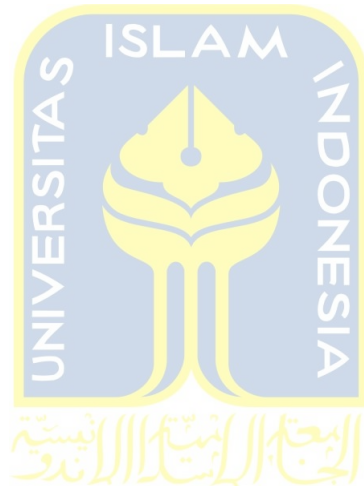
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Pembahasan	15
<u>BAB II</u> KAJIAN PUSTAKA	17
2.1. Landaran Teori dan Pengertian Variabel	17
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	17
2.1.2. <i>Trade Off Theory</i>	18
2.1.3. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	19
2.1.4. <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.4.1. Dewan Komisaris Independen	24
2.1.4.2. Kepemilikan Institusional.....	25
2.1.4.3. Komite Audit	26
2.1.5. Kinerja Keuangan	25
2.1.5.1. Profitabilitas	26
2.1.5.2. <i>Leverage</i>	26
2.1.5.3. Likuiditas	27
2.1.5.4. <i>Sales Growth</i>	28
2.2. Hipotesis Penelitian	28
2.2.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	28
2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	29
2.2.3. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
2.2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31

2.2.5. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.2.6. Pengaruh Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
2.2.7. Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.3. Model Penelitian	35
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	36
3.1. Populasi dan Sampel	36
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data	36
3.3. Pengukuran Variable	37
3.3.1. Variable Dependen.....	37
3.3.1.1 <i>Tax Avoidance</i>	37
3.3.2. Variable Independen.....	38
3.3.2.1 Corporate Governance	38
3.3.2.1.1. Dewan Komisaris Independen	38
3.3.2.1.2. Kepemilikan Institusional	39
3.3.2.1.3. Komite Audit.....	39
3.3.2.2. Kinerja Keuangan.....	40
3.3.2.2.1. Profitabilitas	40
3.3.2.2.2. Leverage	40
3.3.2.2.3. Likuiditas.....	41
3.3.2.2.4. <i>Sales Growth</i>	41
3.4 Metode Analisis Data.....	41
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	41
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	42
3.4.2.1. Uji Normalitas	42
3.4.2.2. Uji Multikolinieritas.....	42
3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	43
3.4.3. Analisis Regresi Berganda	44
3.4.4. Pengujian Hipotesis.....	45
3.4.4.1. Uji Koefisien Determinan	45
3.4.4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).....	45
3.4.4.3. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit).....	45

<u>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</u>	47
4.1 Populasi dan Sampel	47
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.3 Uji Asumsi Klasik	50
4.3.1.Uji Normalitas	50
4.3.2.Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.4.Uji Heteroskedastisitas	54
4.4 Pengujian Hipotesis	55
4.5 Pembahasan.....	58
4.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
4.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
4.5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	60
4.5.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	61
4.5.5. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	62
4.5.6. Pengaruh Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63
4.5.6. Pengaruh Sales Growth terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63
SIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Pemilihan Sampel	47
Table 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Table 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	52
Table 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Table 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Nama Sample Perusahaan
- Lampiran 2 : Daftar Hasil Pehitungan CETR
- Lampiran 3 : Daftar Hasil Pehitungan Dewan Komisaris Independen,
Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tahun 2013 -
2017
- Lampiran 4 : Daftar Hasil Perhitungan Profitabilitas Dan Leverage
tahun 2013 - 2017
- Lampiran 5 : Daftar Hasil Perhitungan Likuiditas dan Sales Growth
tahun 2013 - 2017
- Lampiran 6 : Output Statistik Deskriptif
- Lampiran 7 : Output Uji Normalitas
- Lampiran 8 : Output Uji Multikolinearitas
- Lampiran 9 : Output Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 10 : Output Regresi Linear Berganda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017. Penelitian ini menggunakan 57 sampel perusahaan yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tidak mengalami kerugian sebelum pajak. penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diolah dengan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dewan komisaris independen, komite audit dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. kepemilikan institusional, profitabilitas dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Sales Growth*, *Tax Avoidance*.

ABSTRAC

The study aims to examine the effect of good corporate governance and financial performance on tax avoidance. The population used in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange for the period 2013 – 2017. The study used a sample of 57 companies with selected by purposive sampling method with criteria that companies didn't loss before income tax. The study used secondary data obtained from the Indonesia stock exchange (IDX) and it were analyzed by multiple linear regression analysis. The results of the study show that independent board of commissioners, audit committee and liquidity have a significant negative effect on tax avoidance. Institutional ownership, profitability and sales growth have a significant positive effect on tax avoidance. While the leverage do not effect on tax avoidance.

Keywords : *independent board of commissioners, Institutional ownership, audit committee, profitability, leverage, liquidity, sales growth, tax avoidance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dibebankan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai partisipasi masyarakat terhadap negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan bangsa. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang yang bersifat memaksa yang artinya setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang ditetapkan oleh pemerintah dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana pendapatan terbesar diperoleh melalui sektor perpajakan yang diterima dari wajib pajak. Namun jika dilihat dari sudut pandang perusahaan pajak adalah pada komponen biaya yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Beban tersebut dapat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Di Indonesia pendapatan negara yang diambil dari sektor perpajakan menjadi pendukung terbesar dalam penerimaan dan pembelanjaan negara berkembang ini. Setiap tahunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tidak tercapai secara maksimal realisasinya dengan target yang ditentukannya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus – kasus penghindaran pajak yang terjadi. Ada beberapa kasus mengenai Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), seperti Kasus IKEA yang melakukan upaya penghindaran pajak sebesar lebih dari € 1 Milyar atau sekitar Rp 14,9 triliun

dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Perusahaan *furniture* dari Swedia tersebut membentuk dua entitas bisnis yang berbeda dibelanda yaitu Luksemburg dan Liechtenstein yang digunakan sebagai pusat untuk memindahkan keuntungannya di Eropa Ke Belanda. Dengan demikian IKEA mendapatkan perlakuan pajak khusus dari Belanda (Setiawan, 2017).

Penerimaan pajak di indonesia setiap tahunnya hanya tercapai 50% yang mengakibatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto (PDB) tidak optimal. Penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak ini yaitu diantaranya masih banyaknya perusahaan – perusahaan yang melakukan aktifitas ini diduga salah satunya yaitu PT Adaro Energy, perusahaan tambang terbesar tersebut diduga melakukan aksi penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di singapura. Dari aktifitas ini PT Adaro Energy mendapat keuntungan yaitu bisa membayar pajaknya senilai US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun dengan kurs Rp 14 ribu yang bisa dikatakan lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan (Sugianto, 2019)

Tax Avoidance adalah cara bagi pengusaha - pengusaha untuk meminimalkan pendapatan pajaknya dengan cara menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan dan kelemahan (*grey area*) yang ada dalam undang – undang perpajakan. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III.13.2011 dimana hakim berpendapat bahwa Wajib pajak pada

dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Saputra dan Asyik, 2017).

Perencanaan pajak dengan menggunakan *tax Avoidance* bisa dibidang cara yang sangat agresif, namun hal ini masih legal dilakukan untuk meminimalkan beban pajak karena tidak melanggar undang-undang dan ketentuan pajak. Dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dari ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam menghitung *tax Avoidance* harus dilakukan dengan teliti tanpa melanggar ketentuan dalam perpajakan karena jika salah langkah sedikit maka akan terjerumus dalam kasus pelanggaran pajak yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik Penghindaran Pajak yaitu diantaranya adalah *Corporate Governace* dan Kinerja Keuangan.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris dan manajer yang saling berhubungan untuk menyusun tujuan perusahaan dan mengawasi kinerja dengan dilandasi oleh etika profesional dalam penerapannya. *Good corporate governance* dibutuhkan untuk membentuk peraturan tata kelola perusahaan agar fungsi dan kepentingan perusahaan dapat berlangsung dengan baik, maka dibutuhkan direksi untuk mengelola dan menjalankan perusahaan, memelihara daftar pemegang saham, melakukan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan rapat direksi serta menyelenggarakan pembukuan perseroan (terdapat

dalam undang-undang perseroan terbatas pasal 86). Dengan penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan dewan komisaris independene, kepemilikan institusional dan komite audit.

Dewan komisaris independen merupakan Pengawas direksi dalam menjalankan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maretta dan Widyastuti (2019) yang mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Sari dan Devi (2018) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Pramuka dan Prasetyo (2018), Fajar (2018), Primasari (2019) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh institusi seperti institusi pemerintahan, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lain pada akhir tahun (Pramuka dan Prasetyo, 2018). Beberapa peneliti yang mengambil penelitian terkait kepemilikan institusi seperti penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Pramuka dan Prasetyo (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) dan Maretta dan Widyastuti (2019) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Sedangkan penelitian Utami (2013), Fadhilah (2014), Muttaqin dan Nafi

(2016) dan Djefris dan Erlina (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.

Komite audit berfungsi untuk mengawasi tata kelola perusahaan agar dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan undang – undang, beretika dan mengawasi adanya benturan antar karyawan dan kecurangan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dan Maretta dan Widyastuti (2019) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Djefris dan Erlina (2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukartha dan Swingly (2015), Damayanti dan Susanto (2015), Fajar (2018) dan Sari dan Devi (2018) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber – sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Primasari (2019) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Sari dan Devi (2018) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Utami (2013), Muttaqin dan Nafi

(2016) dan Yuliana (2018) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan hutang dalam pembelanjaan perusahaan (Sudana, 2015), rasio *Leverage* merupakan rasio yang dianggap berpengaruh terhadap terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian dari Fadli (2016) dan Fajar (2018) mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini berbeda dengan penelitian dari Sukartha dan Swingly (2015) dan Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Agusti (2014), Yuliana (2018) dan Primasari (2019) mengatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sudana, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Bagus dan Noviari (2015) dan Budianti dan Curry (2018) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) dan Yuliana (2018) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukartha dan Swingly (2015), Rozak dan Fadilah (2018) dan Ariani (2018) mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak,

Penjualan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan aset perusahaan, jika penjualan meningkat maka aset akan bertambah, untuk

mengoptimalkan strategi penjualan dengan sumber daya yang ada maka dengan melihat strategi dan hasil penjualan dari yang sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Wardani (2019) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukartha dan Swingly (2015) dan Primasari (2019) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa penelitian di atas dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten atau tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang tidak konsisten tersebut terlebih terdapat pada penerapan corporate governance perusahaan dan dari kinerja keuangan yang masih terdapat hasil yang tidak konsisten yaitu pada *Leverage*. Ketidakkonsistenan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti perbedaan variable independen di dalam setiap penelitian mengakibatkan masih terdapatnya ketidakkonsistenan didalam penelitian terdahulu, selain itu penggunaan alat pengukuran disetiap penelitian juga terdapat perbedaan yang mengakibatkan hasil yang bervariasi sehingga menghasilkan variable tersebut tidak berpengaruh atau tidak konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan**

Terhadap *Tax Avoidance* (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013 -2017”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, berikut rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidace*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?
6. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?
7. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax Avoidance*

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax Avoidance*
6. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax Avoidance*
7. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pemerintahan untuk melihat lagi regulasi-regulasi yang ada untuk menentukan kebijakan-kebijakan mengenai praktik penghindaran pajak (*tax Avoidance*) yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor pajak

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat untuk menambah wawasan mengenai penghindaran pajak (*tax Avoidance*) dan menjadi acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini. Dari teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menguraikan temuan tersebut.

BAB V : Simpulan, saran dan implikasi

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landaran Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1. *Agency Theory*

Untuk memahami konsep *corporate governance* maka digunakan dasar hubungan keagenan. Teori agensi menjelaskan tentang konsep pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan yang disebut sebagai *principle* dan manajer perusahaan yang disebut sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham (*principle*) adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan sedangkan manajer (*agent*) adalah pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Karena adanya pemisahan diantara pihak pemilik dan pihak pengelola manajemen tersebut maka tidak bisa dihindari jika terjadi kemungkinan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Pihak manajemen selaku pengelola perusahaan dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan (Sudana, 2015).

Teori agensi merupakan perspektif yang jelas dalam menggambarkan adanya konflik kepentingan dalam perusahaan yang timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan yang dapat mendorong agen sebagai pengendali perusahaan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai

dengan kepentingan principle sebagai pemegang saham. Masalah ini disebut dengan *agency problem* atau masalah agensi, hal ini dapat timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Yunanda, 2016)

2.1.2. *Theory Trade Off*

Theory Trade Off adalah teori yang membahas mengenai struktur modal yaitu dengan melihat seberapa besar hutang dan modal dari perusahaan, untuk mencapai struktur modal yang optimal maka harus menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang terjadi akibat dari penggunaan hutang. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak, hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat menimbulkan biaya bunga, dan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Namun *theory trade off* berasumsi bahwa ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya yaitu dengan tingginya hutang, akan semakin tinggi tingkat kemungkinan kebangkrutan. Apabila manfaat masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengorbanan dari penggunaan hutang maka peningkatan hutang masih diperkenankan, namun jika pengorbanan penggunaan hutang lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh maka peningkatan hutang harus dihentikan.

2.1.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hulagaol, 2007). Dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) wajib pajak dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang – undang perpajakan. Pada dasarnya praktik *tax Avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan, karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan namun beberapa instansi atau perusahaan cenderung memanfaatkan kelegalan ini untuk memaksimalkan pendapatan tanpa dapat mengurangi kewajibannya lebih banyak.

Menurut Brian & Martani (2014) undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, yakni sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehubungan dengan hal ini, fiskus hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung didalam proses perhitungan. Penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Praktik penghindaran pajak ini merupakan kasus yang sangat rumit, perusahaan cenderung menginginkan beban pajaknya dapat

diminimalisir dan hal tersebut tidak melanggar undang – undang namun disisi lain kasus tersebut bukanlah keinginan dari pembuat undang – undang. Oleh karena itu, dengan strategi dan teknik penghindaran pajak yang aman tanpa melanggar ketentuan pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang ketentuan perpajakan. Selain itu dapat memanfaatkan pengecualian dan potongan pajak, maka dari itu manajemen perpajakan sangatlah diperlukan untuk melaksanakan strategi – strategi yang memungkinkan untuk dapat menekan pajak dan menunda pembayaran pajak untuk mendapatkan likuiditas yang diharapkan perusahaan

2.1.4. *Corporate Governance*

Definisi *Corporate Governance* dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate covernance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Corporate governance mempunyai beberapa prinsip yang diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintahan untuk membangun *framework* dalam menerapkan *corporate governance*, dengan prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan nilai dan keuntungan serta dapat mengembangkan usaha perusahaan dengan etis dan bertanggungjawab.

Berikut merupakan prinsip – prinsip *corporate governance* yang dirumuskan *Organization for Economic Corporation and Developmant* (OECD) antara lain:

1. *Transparansi* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dengan benar, tepat dan akurat mengenai perusahaan, baik dalam rangka pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan kekuatan dan keseimbangan antara manajer, pemegang saham, komisaris dan auditor. Prinsip ini diterapkan dengan menghasilkan laporan keuangan dengan waktu dan cara yang tepat dan benar, dengan ini perusahaan akan mencapai going concern.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawab)

Responsibility adalah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara tunduk dan patuh terhadap hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial untuk menjaga kesinambungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, dengan menjadi profesional, menjaga etika dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency adalah suatu bentuk pengelolaan perusahaan tanpa independen, yaitu tanpa saling mendominasi dan tanpa saling memberi tekanan kepada orang lain, hal ini dapat membantu dapat membuat keputusan yang akurat dan tepat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Fairness dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham untuk memenuhi hak-haknya. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat perjanjian dan peraturan perundang-undangan mengenai korporasi untuk melindungi kepentingan minoritas, perlakuan buruk terhadap perusahaan, *self dealing*, dan konflik kepentingan, serta kejelasan hak-hak bermodal.

Dalam penerapannya *corporate governance* mempunyai beberapa mekanisme untuk menjaga agar perusahaan dapat dikelola sesuai dengan wewenang masing-masing jabatan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini diantaranya adalah:

2.1.4.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota dari manajemen, Pemegang saham mayoritas, pejabat atau yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu

perusahaan (Hanum, 2013). Di dalam peraturan OJK No.55/PJOK/2015 Pasal 1 komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan public dan memenuhi persyaratan yang dimulai dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan tingginya proporsi dewan komisaris dapat meminimalisir kecurangan pelaporan pajak oleh manajemen dan juga meningkatkan integritas pada nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen sehingga proporsi komisaris yang semakin besar maka akan semakin besar pula independensi suatu perusahaan, hal ini dikarenakan tidak adanya kaitan dengan pemegang saham pengendali. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentasi komisaris komisaris independen diatas 30% maka terdapat satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance telah berjalan dengan baik.

2.1.4.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme dari corporate governance yang dapat mengendalikan adanya masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional mempunyai peran dalam mendorong pengawasan

kinerja manajemen agar lebih optimal lagi dalam memonitori kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan adanya persentase kepemilikan oleh institusi ini akan lebih besar pengaruhnya terhadap adanya konflik keagenan, dengan begitu konflik antara stakeholders dan menejer akan menjadi berkurang. Kepemilikan institusi juga dapat dengan mudah memonitori setiap keputusan yang akan diambil oleh manajemen dan mengoptimalkan kinerja manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya serta menjamin investor untuk kedepannya. Maka dari itu untuk mencapai hal tersebut para pemilik institusi dapat mendorong perencanaan pajak yang agresif sehingga mengarah pada praktik penghindaran pajak.

2.1.4.3. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu mekanisme yang diperlukan perusahaan untuk dapat memenuhi prinsip dari *good corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan memeriksa tugas dan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan, selain itu komite audit juga bertugas mengawasi auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, komite audit juga sebagai pemberi saran dan pendapat kepada dewan komisaris atas laporan yang disampaikan direksi mengenai perusahaan serta hal – hal yang

mebutuhkan campur tangan dewan komisaris. Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari tiga anggota. Komite audit diukur dengan menggunakan variable *dummy* yang bernilai 1 jika komite audit berjumlah tiga anggota, dan bernilai 0 jika komite audit kurang dari tiga anggota. Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung bertindak lebih efisien namun komite audit juga harus mempunyai pemahaman dan keahlian yang memadai serta memiliki wewenang dan fasilitas dalam mengakses data perusahaan karena hal ini yang akan menjadikan tugas komite audit lebih efektif dan efisien. Seorang komite audit harus mempunyai commonsense yaitu kecerdasan dan bersifat independen (Pohan, 2009)

2.1.5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu faktor yang dijadikan penentu para calon investor untuk melakukan investasi saham pada perusahaan, maka dari itu perusahaan berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk menarik investor dan menjaga kepercayaan para investor dalam menanamkan investasinya pada perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan tersebut dalam penelitian ini terdiri dari

2.1.5.1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber – sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dilihat dari aktivitas bisnis perusahaan. Dengan melihat laba perusahaan profitabilitas juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, jika profitabilitas tinggi maka semakin baik pula perusahaan. Laba perusahaan merupakan penentu dari pengenaan pajak maka dari itu semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pula kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Dari beberapa keadaan, perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi maka semakin baik juga perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat memperoleh pajak yang optimal. oleh karena itu, perusahaan yang dapat mengelola labanya dengan baik maka akan terhindar dari praktik penghindaran pajak.

2.1.5.2. Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan hutang dalam pembelanjaan perusahaan (Sudana, 2015), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dalam

pembelanjakan perusahaan dibandingkan dengan asetnya. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Rasio ini mencerminkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* yang tinggi maka menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan dalam membiayai asetnya akan bergantung pada hutang sehingga semakin tinggi hutang perusahaan akan menurunkan laba dan juga mempengaruhi besar pajak yang akan ditanggung perusahaan.

2.1.5.3. Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan keadaan dan kemampuan arus kas perusahaan. Likuiditas sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal tersebut menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Menurut Siahaan (2005) mengatakan bahwa likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajaknya sehingga dapat menimbulkan adanya agresivitas terhadap pajak seperti halnya praktik menghindarkan pajak. hal inilah yang memicu mengapa perusahaan lebih mengutamakan arus kasnya daripada

membayar pajaknya yang tinggi, karena tidak hanya mempertahankan arus kas perusahaan yang stabil namun juga hasil dari penghematan pajak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.5.4. *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dari jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan mencerminkan indikator keberhasilan investasi dari periode masa lalu yang menjadi prediksi dari periode masa kini. Dengan pengukuran pertumbuhan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Namun dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan juga dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka akan meningkat pula laba yang akan dihasilkan perusahaan, sehingga semakin banyak juga perolehan pajak yang akan ditanggung perusahaan, hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2. **Hipotesis Penelitian**

2.2.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang tidak mempunyai afiliasi dengan anggota lain seperti direksi dan pemegang

saham pengendali. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi mengatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik peran komisaris independen dalam mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan juga mengawasi tindakan manajemen yang bersifat oportunistik yang mungkin terjadi. Proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat meminimalisir kecurangan pelaporan pajak oleh manajemen dan juga meningkatkan integritas pada nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen sehingga proporsi komisaris yang tinggi akan semakin tidak ada kaitannya dengan pemegang saham pengendali yang semakin tinggi, maka dari itu praktik *tax Avoidance* akan semakin minim pelaksanaannya atau dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax Avoidance*. Penelitian Suardana (2014) dan Devi (2018) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax Avoidance*.

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme dari corporate governance yang dapat mengendalikan adanya masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976), konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Menurut Maharani dan Suardana (2014) kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, seharusnya hal ini dapat menghindarkan manajemen dalam mementingkan diri sendiri namun pemilik institusi ini mempunyai insentif yang dapat memastikan manajemen untuk mendorong dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.

Kepemilikan instusional akan mendorong pengoptimalisasi pengawasan terhadap manajemen sebagai pengelola perusahaan namun pemilik institusional juga mengendalikan manajemen untuk mencapai keuntungan yang optimal dan menjamin investasi yang berkelanjutan, maka dari itu untuk mencapai hal tersebut para pemilik institusi dapat mendorong perencanaan pajak yang agresif sehingga mengarah pada praktik penghindaran pajak. Penelitian Suardana (2014) dan Pramuka dan Prasetyo (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*

2.2.3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi direksi dalam mengelola perusahaan, mengawasi tugas auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan serta memberi saran dan nasihat kepada dewan komisaris atas hal-hal yang membutuhkan campur tangan dewan komisaris termasuk laporan direksi mengenai perusahaan. Komite

audit sekurang – kurangnya terdiri dari 3 orang sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) karena keberadaan komite audit akan memonitori segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan dan komite audit lebih bertanggung jawab dan terbuka atas penyajian laporan keuangan. Maka dari itu keberadaan komite audit yang sesuai dengan peraturan BEI akan meminimalisir tindakan atau keinginan manajemen dalam mengurangi beban pajak atau tindakan penghindaran pajak. Penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan Djefris dan Erlina (2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Komite audit berpengaruh negatif Terhadap *tax Avoidance*

2.2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber – sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) ROA merupakan suatu indikator penting dalam perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin

tinggi tingkat ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka akan semakin besar keuntungan dari laba yang dihasilkan perusahaan sehingga mempengaruhi pajak penghasilan yang akan diperoleh perusahaan. Dengan tingginya ROA maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dengan cara menekan pajak penghasilan perusahaan dengan kata lain perusahaan akan mampu melakukan praktik *tax avoidance*

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi sudah dipastikan praktik penghindaran pajak . Hal ini sejalan dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) dan Wardani (2019) yang mengatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*

2.2.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam *theory trade off* mengatakan bahwa penggunaan hutang akan memberi manfaat atas berkurangnya pembayaran pajak, hal ini dikarenakan dengan hutang yang tinggi akan meningkatkan bunga hutang yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak yang dikenakan. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi hutang perusahaan akan

mempengaruhi laba perusahaan dan akan menimbulkan bunga hutang yang nantinya berdampak pada semakin kecil pembayaran pajak yang dikenakan perusahaan. Maka dari itu semakin besar tingkat hutang perusahaan maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Penelitian dari Fadli (2016) dan Fajar (2018) yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax Avoidance*

2.2.6. Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Fadli (2016) Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Jika tingkat likuiditas naik maka perusahaan lancar dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, begitu pula dengan sebaliknya jika tingkat likuiditas perusahaan turun menandakan bahwa perusahaan sulit untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka dari itu perusahaan dengan likuiditas yang rendah cenderung mempertahankan arus kasnya, hal inilah yang memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun semakin likuid perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka semakin rendah perusahaan dalam melakukan pajak yang agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) dan Yuliana (2018) mengatakan bahwa

likuiditas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

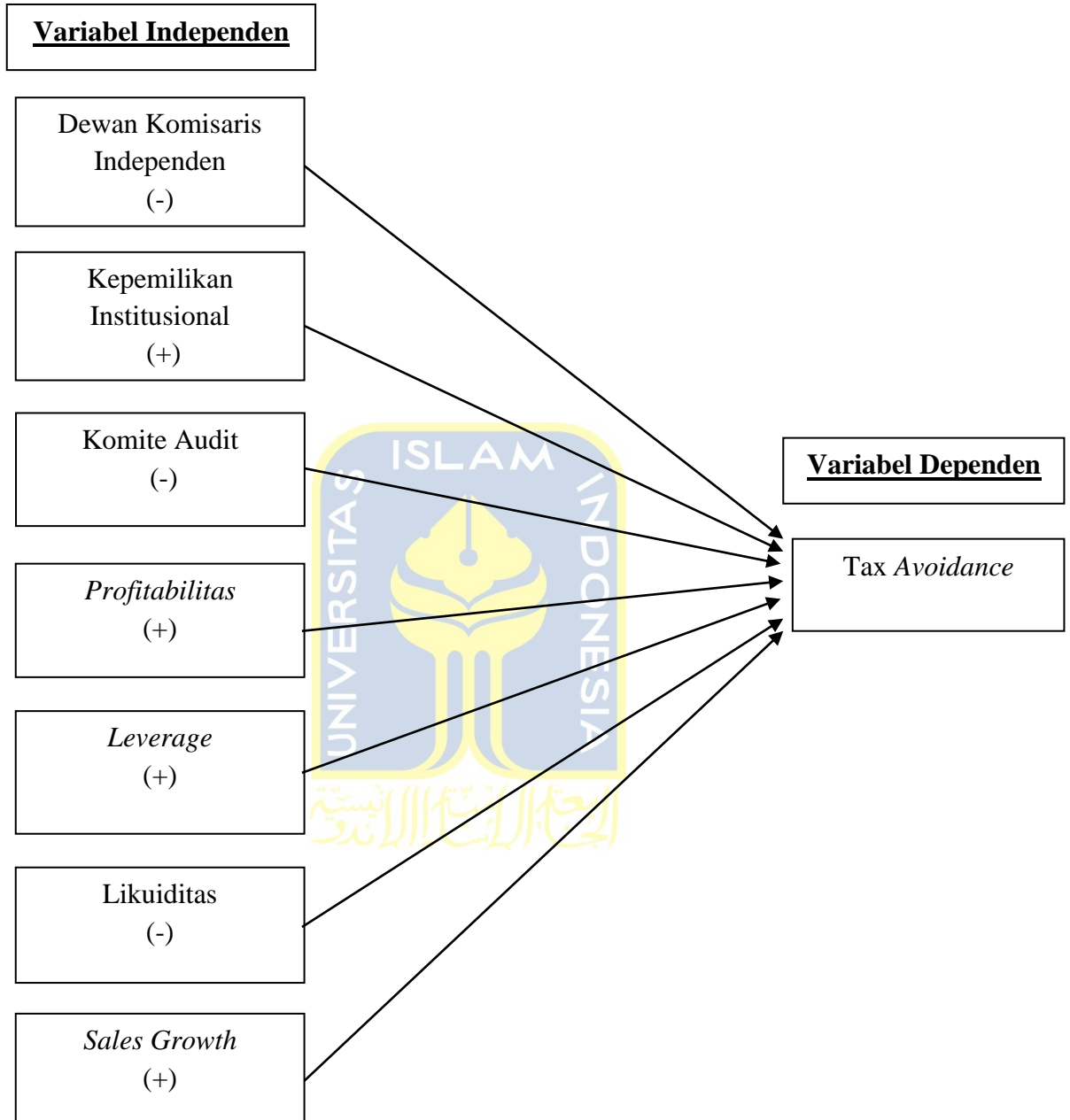
H6 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax Avoidance*

2.2.7. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan mencerminkan indikator keberhasilan investasi dari periode masa lalu yang menjadi prediksi untuk periode masa kini. Dengan pengukuran pertumbuhan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan yang baik serta kinerja yang baik pula, maka nantinya dapat digunakan untuk memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan, dengan meningkatnya laba perusahaan maka meningkat pula beban pajak yang dikenakan perusahaan. Maka dari itulah perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Wardani (2019) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

H7 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.3. Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2013 – 2017. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Penentuan sampel tersebut akan dianalisis terkait dengan pengaruh penghindaran pajak. Penentuan sampel disesuaikan dengan kriteria – kriteria yang ditentukan oleh peneliti, kriterianya sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 – 2017
2. Perusahaan yang secara periodic mengeluarkan *annual report* dengan lengkap pada periode 2013 – 2017
3. Perusahaan dengan laba sebelum pajak yang positif artinya tidak mengalami kerugian selama tahun 2013 – 2017.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari situs www.idx.co.id yaitu situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik Pengumpulan Data

Data – data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu diperoleh dengan cara tidak langsung atau secara observasi terhadap dokumen – dokumen laporan keuangan (annual report).

3.3. Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variable independen dan yaitu variable dependen. Variable independen merupakan variable yang dapat mempengaruhi timbulnya variable terikat, variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Variable dependen merupakan variable yang dapat dipengaruhi oleh variable lain, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax Avoidance*).

3.3.1. Variable Dependen

3.3.1.1. *Tax Avoidance*

Variable dependen dalam penelitian ini adalah *tax Avoidance*. *Tax Avoidance* yaitu cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal untuk mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hulagaol, 2007). Cara ini dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat menekan jumlah pajak yang dapat mengurangi laba. Menurut Januari dan Suardikha (2019) *Tax Avoidance* diukur menggunakan CASH ETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu dihitung dengan rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2. Variable Independen

3.3.2.1. *Corporate Governance*

Definisi *Corporate Governance dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Elemen – elemen good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

3.3.2.1.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen yang bertugas untuk mengawasi tugas dan kebijakan yang diamanahkan kepada direksi dalam menjalankan perseroan termasuk memberikan nasihat kepada direksi. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Menurut Feranika (2014) proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Dewan Komisaris}}$$

3.3.2.1.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh institusi seperti institusi pemerintahan, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lain pada akhir tahun (Pramuka dan Prasetyo, 2018). Kepemilikan institusional juga berperan dalam mengawasi dan memonitori kinerja manajemen. Menurut Feranika (2014) kepemilikan institusional ini dihitung dengan membandingkan seluruh jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham keseluruhan yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar Perusahaan}}$$

3.3.2.1.3. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk mengawasi tugas auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, memberi saran dan pendapat kepada dewan komisaris atas laporan yang disampaikan direksi mengenai perusahaan serta hal – hal yang membutuhkan campur tangan dewan komisaris. Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari tiga anggota dan disertai dengan pemahaman dan pengalaman yang memadai maka akan menjadikan komite audit lebih efektif dan efisien. Menurut Feranika (2014) Komite audit diukur melalui jumlah anggotanya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total Anggota Komite Audit}$$

3.3.2.2. Kinerja Keuangan

3.3.2.2.1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dengan cara mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dilihat dari aktivitas bisnis perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Menurut Yuliana (2018) rumus *Return On Assets* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.2.2. Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. *Leverage* dalam penelitian ini dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), DER merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah hutang perusahaan yang dibandingkan dengan modalnya. Menurut Yuliana (2018) DER dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.2.3. Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan keadaan dan kemampuan arus kas perusahaan. Likuiditas sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini dihitung menggunakan *Current*

Ratio (CR). Menurut Yuliana (2018) *current Ratio* dihitung menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

3.3.2.2.4. *Sales Growth*

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan adalah peningkatan jumlah penjualan dilihat dari waktu ke waktu. Petumbuhan penjualan mencerminkan indikator keberhasilan investasi dari waktu ke waktu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Menurut Januari dan Suardikha (2019) di dalam penelitiannya perumbuhan penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{PENJUALAN}_t - \text{PENJUALAN}_{t-1}}{\text{PENJUALAN}_{t-1}}$$

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu metode yang berhubungan dengan masalah pengumpulan data, pengorganisasian, peringkasan dan penyajian data. Data – data yang disajikan akan lebih informatif dengan disertai berbagai gambar dan grafik. Statistik deskriptif merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui suatu deskripsi dengan melihat nilai rata – rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi berganda dapat menjadi dasar estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik menggunakan empat pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk menguji apakah model regresi, variable dependen, variable independen dan kedua variable tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalnya dalam model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi normal atau bisa mendekati normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji normalitas residual yaitu *Kolmogorov Smirnov*, pengujiannya menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (5%).

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antara variable independennya. Didalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF), karena dapat menunjukkan setiap variable independen yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Setiap variable independen menjadi variable dependen dan diregresikan terhadap variable independen lainnya. Tolerance mengukur variable independen terpilih yang tidak

dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari pengamatan residual satu ke pengamatan lainnya tetap maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terdapat atau tidak terdapatnya heteroskedastisitas dengan melihat dari hasil pengolahan data melalui SPSS yaitu dengan uji glejser. Untuk melihat hasil dari uji heteroskedastisitas yaitu dari nilai signifikan yang mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode statistika model analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017. Metode statistika ini dinyatakan dalam perusahaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1DKI + \beta_2KI + \beta_3KA + \beta_4ROA + \beta_5DER + \beta_6CR + \beta_7SG + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance (ETR – Effective Tax Rate)*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

DKI = Dewan Komisaris Independen

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

ROA = *Return on Assets*

DER = *Debt to Equity Ratio*

CR = *Current Ratio*

SG = *Sales Growth*



3.4.4. Pengujian Hipotesis

3.4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasinya adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil yaitu berarti kemampuan variable independennya dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable independennya memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2011)

3.4.4.2. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik T)

Uji signifikansi parameter individu atau disebut sebagai uji T ini berfungsi untuk menguji koefisien regresi dari variable independen dengan menerangkan variable dependen. Kriteria pengujian hipotesis yaitu Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi maka H_0 ditolak atau H_a didukung.

3.4.4.3. Uji Kesesuaian Model (Goodness of fit)

Uji kesesuaian model atau dikenal sebagai uji F berguna untuk menguji apakah model regresi penelitian ini dikatakan layak digunakan untuk memprediksi pengujian hipotesis lebih lanjut (Ghozali, 2011), uji F dapat digunakan untuk apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan $0,05$ ($\alpha = 5\%$). Kriteria pengujian hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $F < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu model yang digunakan sesuai.
- b. Jika nilai probabilitas $F < \alpha$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu model yang digunakan tidak sesuai.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun yaitu 2013 – 2017. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu sebanyak 57 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan 285 sampel dengan outliner 5 sehingga terdapat total 280 data sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 – 2017	172
2	Perusahaan yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> secara lengkap di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 - 2017	(60)
3	Perusahaan mengalami kerugian selama tahun 2013 - 2017	(55)
	Total sampel perusahaan per tahun	57
	Total sampel penelitian 5 tahun	285
	Data Outliner	(5)
	Total data yang digunakan dalam penelitian	280

Sumber : Data Diolah, 2021

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran sebuah variable-variable penelitian yang diukur secara statistik. Pengukuran tersebut akan menghasilkan nilai rata – rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi, hasil tersebut diambil dari 280 sampel dari 57 perusahaan manufaktur dengan mengambil periode 2013 – 2017 dengan 5 data outlier. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptif yang diolah menggunakan SPSS:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	280	,2000	1,0000	,407320	,1148817
Kepemilikan Institusional	280	,0211	4,7899	,747963	,5405661
Komite Audit	280	3,0000	5,0000	3,085714	,3049347
Profitabilitas	280	-,0033	,7824	,095196	,1011829
Leverage	280	,0021	10,9269	,882066	1,0441176
Likuiditas	280	,6718	13,9941	3,375442	2,1652570
Sales Growth	280	-,5000	1,2535	,089242	,1589562
Tax Avoidance	280	-1,3411	5,5484	-,189778	,4437482
Valid N (listwise)	280				

Sumber : Data Diolah, 2021

1. Dewan komisaris independen mempunyai nilai maksimum sebesar 1 yang diperoleh PT Arwana Citramulia Tbk dan nilai minimum sebesar 0,2 yang diperoleh PT Semen Baturaja Tbk. Sedangkan nilai rata-rata (mean)

dewan komisaris independen sebesar 0,407320 dengan standar deviasi sebesar 0,1148817. Nilai rata – rata dewan komisaris independen lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat homogen, hal ini berarti perbedaan data 1 dengan yang lain tidak tinggi. Terdapat 40,73% dewan komisaris independen dari total dewan komisaris dapat dikatakan baik karena nilai rata – rata dewan komisaris independen sekurang – kurangnya 30% sesuai dengan peraturan BEI.

2. Kepemilikan institusional mempunyai nilai maksimum sebesar 4,7899 yang diperoleh PT Argha Karya Prima Industry Tbk dan nilai minimum sebesar 0,0211 yang diperoleh PT Intanwijaya Internasional Tbk. Sedangkan nilai rata-rata (mean) kepemilikan institusional sebesar 0,747963 dengan standar deviasi sebesar 0,5205661. Nilai rata – rata kepemilikan institusional lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat homogen, hal ini berarti 100% dari saham beredar perusahaan sampel terdapat 74,79% dimiliki oleh institusional.
3. Komite audit mempunyai nilai maksimum sebesar 5 yang diperoleh PT Semen Indonesia Tbk dan PT Pyridam Farma Tbk dan mempunyai nilai minimum sebesar 3. Sedangkan nilai rata-rata (mean) komite audit sebesar 3,085714 dengan standar deviasi sebesar 0,3049347. Nilai rata- rata komite audit lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat homogen, hal ini berarti dewan komisaris menunjukkan keanggotaan komite audit sekurang - kurangnya 3 orang sesuai dengan peraturan BEI untuk membantu tugas dewan komisaris dalam memonitori pekerjaan manajemen dan segala aktivitas perusahaan.

4. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) mempunyai nilai maksimum sebesar 0,7824 yang diperoleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan mendapatkan nilai minimum sebesar -0,0033 yang diperoleh PT Asiaplast Industries Tbk. Sedangkan nilai rata-rata profitabilitas sebesar 0,095196 dengan standar deviasi sebesar 0,1011829. Nilai rata – rata profitabilitas lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat heterogen, hal ini dikarenakan perusahaan dalam menggunakan aktivitya tidak begitu efektif. Rata – rata kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 9,5% dari aset yang digunakan.
5. *Leverage* yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) mempunyai nilai maksimum sebesar 10,9269 yang diperoleh PT Indal Alumunium Industry Tbk dan mendapatkan nilai minimum sebesar 0,0021 yang diperoleh PT Aneka Gas Industri Tbk. Sedangkan nilai rata – rata (Mean) *Leverage* sebesar 0,882066 dengan standar deviasi sebesar 1,0441176. Nilai rata – rata leverage lelebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat heterogen.
6. Likuiditas yang diprosikan dengan Current Ratio (CR) mempunyai nilai maksimum sebesar 13,9941 yang diperoleh PT Semen Baturaja Tbk dan mendapatkan nilai minimum sebesar 0,6718 yang diperoleh PT Indal Alumunium Industry Tbk. Sedangkan nilai rata – rata (mean) likuiditas sebesar 3,375442 dengan standar deviasi sebesar 2,1652570. Nilai rata – rata likuiditas lebih besar dari standar deviasai menunjukkan bahwa data bersifat homogen.

7. *Sales Growth* mempunyai nilai maksimum sebesar 1,2535 yang diperoleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dan nilai minimum sebesar -0,5 yang diperoleh PT Star Petrochem Tbk. Sedangkan nilai rata-rata (mean) *Sales Growth* sebesar 0,089242 dengan standar deviasi sebesar 0,1589562. Nilai rata – rata sales growth lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa data bersifat heterogen.
8. *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan ETR mempunyai nilai maksimum sebesar 5,5484 yang diperoleh PT Indo Acidatama Tbk dan mendapatkan nilai minimum sebesar -1,3411 yang diperoleh PT Asiaplast Industries Tbk. Sedangkan nilai rata-rata penghindaran pajaknya sebesar -0,189778 dengan standar deviasinya sebesar 0,4437482. Nilai rata – rata tax avoidance lebih kecil dari standar deviasai menunjukkan bahwa data bersifat heterogen. Nilai rata – rata sebesar -0,189778 berarti tingkat CETR jauh dari angka 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik tax avoidance.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk menguji apakah model regresi, variable dependen, variable independen dan kedua variable tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalnya dalam model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi normal atau bisa mendekati normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji normalitas

residual yaitu *Kolmogorov Smirnov*, pengujiannya menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (5%). Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		280
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0362456
	Std. Deviation	,21580665
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,047
Kolmogorov-Smirnov Z		1,322
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

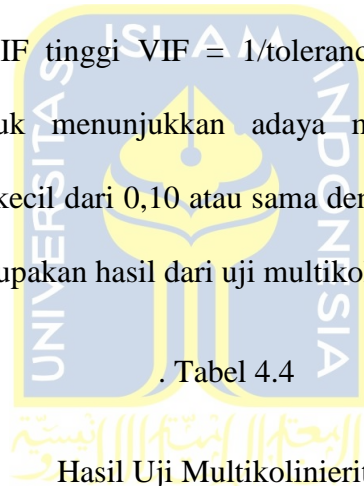
Sumber : *Data Diolah, 2021*

Dari uji *one sample kolmogorov smirnov test* diatas menghasilkan Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,061 yang dapat disimpulkan bahwa lebih besar dari 0,05 yang berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable

bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antara variable independennya. Didalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF), karena dapat menunjukkan setiap variable independen yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Setiap variable independen menjadi variable dependen dan diregresikan terhadap variable independen lainnya. Tolerance mengukur variable independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/tolerance$). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Berikut merupakan hasil dari uji multikolinieritas



. Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Dewan Komisaris Independen	,907	1,102	Tidak Ada Multikolinieritas
	Kepemilikan Institusional	,810	1,235	Tidak Ada Multikolinieritas
	Komite Audit	,965	1,037	Tidak Ada Multikolinieritas

Profitabilitas	,877	1,140	Tidak Ada Multikolinieritas
Leverage	,288	3,469	Tidak Ada Multikolinieritas
Likuiditas	,270	3,701	Tidak Ada Multikolinieritas
Sales Growth	,926	1,079	Tidak Ada Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data Diolah, 2021

Dari uji multikolinieritas diatas menghasilkan nilai toleransi $> 0,10$ dan *variance inflation factor* (VIF) < 10 . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas didalam variable independen penelitian ini.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2011) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari pengamatan residual satu ke pengamatan lainnya tetap maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser:

Table 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,271	,100		2,715	,007	
	Dewan Komisaris Independen	-,065	,038	-,108	-1,735	,084	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Kepemilikan Institusional	-,009	,016	-,037	-,561	,575	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Komite Audit	-,094	,074	-,076	-1,260	,209	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Profitabilitas	-,010	,095	-,007	-,106	,916	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Leverage	-,007	,018	-,042	-,378	,706	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Likuiditas	-,048	,032	-,173	-1,517	,130	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Sales Growth	,078	,064	,075	1,216	,225	Tidak Ada Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Diolah, 2021

Dari uji heteroskedastisitas diatas menghasilkan uji Glejser dari nilai signifikansi dari masing – masing variable independen $> 0,05$. Model yang baik adalah yang tidak mempunyai gejala heteroskedastisitas, hasil diatas disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya

4.4 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode statistika model analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017. Hasil dari analisis regresi berganda sebagai berikut:

Table 4.6

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,364	,204		1,787	,075	
	Dewan Komisaris Independen	-,213	,077	-,160	-2,758	,006	H1 Didukung
	Kepemilikan Institusional	,070	,032	,133	2,161	,032	H2 Didukung
	Komite Audit	-,524	,152	-,194	-3,449	,001	H3 Didukung
	Profitabilitas	,472	,194	,144	2,438	,015	H4 Didukung
	Leverage	-,024	,036	-,068	-,663	,508	H5 Tidak Didukung
	Likuiditas	-,131	,065	-,215	-2,026	,044	H6 Didukung
	Sales Growth	,345	,132	,151	2,625	,009	H7 Didukung
Adjusted R Square		,149					
F		7,984					
Sig		,000 ^b					

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data Diolah, 2021

Dari tabel diatas menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,364 - 0,213\text{DKI} + 0,070\text{KI} - 0,524\text{KA} + 0,472\text{ROA} - 0,024\text{DER} - 0,131\text{CR} + 0,345\text{CR} + e$$

Dari tabel diatas menghasilkan nilai F hitung sebesar 7,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable independen secara serentak atau simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi didalam table menghasilkan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,149 atau 14,9%. Hal ini bermakna bahwa variable independen dapat menjelaskan sebesar 14,9% dari perubahan variable dependen, sedangkan sisanya sebesar 85,1% dapat dijelaskan dengan variable lainnya.

1. Hipotesis Pertama

Hasil pengujian terhadap hipotesis satu dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable dewan komisaris independen sebesar -0,213 dengan probabilitas $0,006 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 didukung.

2. Hipotesis Kedua

Hasil pengujian terhadap hipotesis dua kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable kepemilikan institusional sebesar 0,070 dengan tingkat probabilitas $0,032 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 didukung.

3. Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian terhadap hipotesis tiga komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidanc*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable komite audit sebesar -0,524 dengan tingkat probabilitas $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 didukung

4. Hipotesis Keempat

Hasil pengujian terhadap penelitian hipotesis empat *Return On Asset* (ROA) yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable profitabilitas sebesar 0,472 dengan tingkat probabilitas $0,015 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 didukung.

5. Hipotesis Kelima

Hasil pengujian terhadap penelitian hipotesis lima *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan proksi dari *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable *Leverage* sebesar -0,024 dengan tingkat probabilitas $0,508 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 tidak didukung

6. Hipotesis Keenam

Hasil pengujian terhadap hipotesis enam *Current Ratio* (CR) yang merupakan proksi dari likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien

variable likuiditas sebesar -0,131 dengan tingkat probabilitas $0,044 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 didukung.

7. Hipotesis Ketujuh

Hasil pengujian terhadap hipotesis tujuh *Sales Growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien variable *Sales Growth* sebesar 0,345 dengan tingkat probabilitas $0,009 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 didukung.

4.5 Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Hasil ini dikarenakan keberadaan dewan komisaris sangat berpengaruh secara efektif atas praktik *tax Avoidance* (Jensen & Meckling, 1976) dalam teori agensi mengatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik dalam mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan mengawasi tindakan manajemen yang bersifat oportunistik yang mungkin terjadi. Proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat meminimalisir kecurangan pelaporan pajak oleh manajemen dan juga meningkatkan integritas pada nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen sehingga proporsi komisaris yang tinggi akan semakin tidak ada kaitannya dengan pemegang saham pengendali yang semakin tinggi, maka dari itu praktik *tax Avoidance*

akan semakin minim pelaksanaannya atau dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*

Menurut Feranika (2014) Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah

4.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Menurut Pramuka dan Prasetyo (2018) Perusahaan dalam rangka mengurangi *agency problem* dan mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan, maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional.

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal sebagai akibat dari besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di

perusahaan. kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang mengakibatkan perilaku *tax avoidance* perusahaan akan semakin meningkat.

Menurut (Feranika, 2014) semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga semakin besar kepemilikan saham oleh institusional akan meningkatkan tindakan *tax Avoidance*.

4.5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit secara efektif berpengaruh terhadap berkurangnya praktik *tax avoidance*. Menurut Pohan (2009) BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus 3 orang, kurang dari 3 orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, maka dari itu semakin banyak jumlah komite audit maka pengendalian yang dilakukan juga

semakin besar sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka semakin meminimalisir tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Komite audit dibuat dan dipilih oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap perbedaan kepentingan dan kecurangan yang ada dalam perusahaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya agency problem. Didalam teori agensi, agency problem terjadi dikarenakan terjadi asimetri informasi. Oleh karena itu harus dibentuk komite audit untuk mengawasi kegiatan dan aktivitas perusahaan sehingga semakin banyak jumlah komite audit didalam perusahaan diharapkan pengendalian dan pengawasannya semakin baik termasuk meminimalisir tax avoidance. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

4.5.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan nilai Return on Asset berpengaruh terhadap berkurangnya praktik *tax avoidace*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) ROA merupakan suatu indikator penting dalam

perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi tingkat ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka akan semakin besar keuntungan dari laba yang dihasilkan perusahaan sehingga mempengaruhi pajak penghasilan yang akan diperoleh perusahaan. Dengan tingginya ROA maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dengan cara menekan pajak penghasilan perusahaan dengan kata lain perusahaan akan mampu melakukan praktik *tax avoidance*.

4.5.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* yang diprosikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan *Leverage* bukan merupakan faktor penentu dalam melakukan tindakan *tax Avoidance*. Menurut teori *trade off*, penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak, hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat menimbulkan biaya bunga, dan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dengan meningkatnya biaya bunga akan memberi pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Dalam penelitian ini mengatakan bahwa *Leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan hutang dalam membiayai aset perusahaan bukan berarti untuk mengambil keuntungan dari

berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan melainkan untuk aktivitas investasi berjangka panjang sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya hutang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dari sisi dimana biaya bunga yang ditimbulkan dari aktivitas hutang yang diperoleh dari kreditur yang tidak mempunyai relasi dengan perusahaan, sedangkan hutang yang diperoleh dari pemegang saham atau pihak yang mempunyai relasi tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

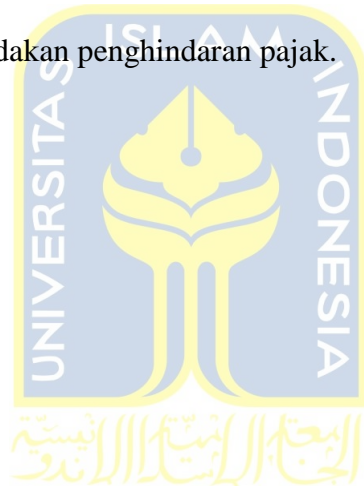
4.5.6. Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Menurut Fadli (2016) Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Jika tingkat likuiditas naik maka perusahaan lancar dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, begitu pula dengan sebaliknya jika tingkat likuiditas perusahaan turun menandakan bahwa perusahaan sulit untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka dari itu perusahaan dengan likuiditas yang rendah cenderung mempertahankan arus kasnya, hal inilah yang memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

4.5.7. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax Avoidance*. Menurut Dewinta

dan Setiawan (2016) semakin besar volume penjualan suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan sehingga pertumbuhan penjualan juga semakin baik dan akan meningkatkan laba perusahaan, laba yang semakin tinggi akan memicu semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Berdasarkan teori agensi, seorang agent yang merupakan pihak manajemen yang mengelola perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh laba yang sebesar - besarnya untuk memperoleh kompensasi yang lebih besar sehingga manajemen cenderung melakukan menghemat beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.



BAB V

SIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit serta kinerja keuangan yang diprosikan dengan profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth* terhadap *Tax Avoidance* dari perusahaan – perusahaan manufaktur yang berkisar tahun 2013 – 2017 dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berikut adalah hasil dari penelitian ini:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen dan komite audit dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.
2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka akan mendorong tindakan penghindaran pajak artinya kepemilikan saham oleh institusional sangat menentukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu dengan

tingginya tingkat sales growth dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

5.2.Implikasi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu institusi perpajakan dalam menerapkan dan memperbaiki kebijakan perusahaan menjadi semakin baik sehingga dapat menekan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan merujuk kepada meningkatnya praktik penghindaran pajak, hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali regulasi, peraturan dan perundang – undangan perpajakan agar perusahaan tidak lagi dapat mengambil celah dan memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

5.3.Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu nilai Adjusted R Square sebesar 0,149 atau 14,9%. Hal ini berarti variable independen dapat menjelaskan sebesar 14,9% dari perubahan variable dependen, sedangkan sisanya sebesar 85,1% dapat dijelaskan dengan variable lainnya. Dari penelitian ini diharapkan bahwa peneliti selanjutnya dapat

melakukan penelitian lebih lanjut pada pengaruh profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2014). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Ariani, M. dan H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). 11(3), 452–463.
- Ariawan, I Made dan Setiawan, P. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1831–1859.
- Bagus, I., Fajar, P. dan, & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. 13, 973–1000.
- Brian, I., & Martani, D. (2014). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. 16(2), 125–139.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 1205–1209.
- Damayanti, Fitri dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audiy, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. 5(2), 187–206.
- Darmawan, I Gede dan Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 1, 143–161.
- Dewinta, Ida dan Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. 14, 1584–1613.
- Diantari, P R dan Ulupui, A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. 16(*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali , Indonesia*), 702–732.
- Djefris, Dedy dan Erlina, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoisance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016).*Jurnal ekonomi & bisnis dharm andalas*. 20(2).
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011) *Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang Wisuda Periode Maret 2014*.

- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. 3. *JOM Fekon, Vol.3 No.1*
- Fajar, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JOM FEB, Volume 1 Edisi 1*
- Feranika, A. (2014). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage terhadap tax avoidance. (2), 31–39.
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram IBM SPSS 19 edisi kelima. *Universittas Diponegoro : Semarang.*
- Hanum, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Akuntansi : 1-54.*
- Hulagaol, J. (2007). Perpajakan : Isu - isu Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Januari, Made Desak dan Suardikha, I. M. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. 27, 1653–1677.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . *Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*
- Maharani, I Gusti dan Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali ,. 2, 525–539.*
- Maretta, D., & Widyastuti, T. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *I(1), 145–154.*
- Muttaqin, Ibnu dan Nafi, I. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Karakteristik Eksekutif. *VIII(1).*
- Pramuka, Bambang A dan Prasetyo, I. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018*
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitad Audit Terhadap Tax Avoidance. *8(1), 21–40.*
- Rozak, Syah Tresna dan Fadilah, H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. 5.

- Saputra, Moses D dan Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(tax avoidace), 1–9.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. 2(2), 298–306.
- Setiawan, D. A. (2017). Kini Giliran IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak.
- Siahaan, F. (2005). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan. *Disertasi, Perpustakaan Universitas Airlangga*
- Sudana, I. M. (2015). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik (2nd ed.; N. I. Sallama, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sugianto, D. (2019). Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro.
- Sugiyono. (2007). Statistik Untuk Penelitian. (Mulyatiningsih, Ed). Jawa Barat: CV ALFABETA.
- Sukartha, I Made dan Singly, C. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Dari uraian. 1*, 47–62.
- T Pohan, H. (2009). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. 4(2).
- Utami, N. W., Ekonomi, F., & Maret, U. S. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). *perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id*.
- Wardani, D. A. (2019). Pengaruh Komite Audit, Leverage, Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Yuliana, I. F. D. W. D. (2018). Likuiditas, Profitablitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. 7(2), 105–120.
- Yunanda, D. (2016). Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 131–143.

LAMPIRAN



Lampiran 1

Daftar Nama Sample Perusahaan

1	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk
3	AKPI	PT Argha Karya Prima industry Tbk
4	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
5	APLI	Pt Asioplast Industries Tbk
6	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
7	ASII	PT Astra International Tbk
8	AUTO	PT Astra Auto Part Tbk
9	BATA	PT Sepatu Bata Tbk
10	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk
11	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
12	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
13	DPNS	PT Duta Perwira Nusantara
14	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
15	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
16	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
17	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk
18	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
19	IGAR	PT Champion Pasific Indonesia Tbk
20	INAI	PT Indal Aluminium Industry Tbk
21	INCI	PT Intanwjaya Internasional TBK

22	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
23	INDS	PT Indospring Tbk
24	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk
25	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
26	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
27	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
28	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
29	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk
30	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
31	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk
32	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
33	LION	PT Lion Metal Works Tbk
34	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk
35	MERK	PT Merck Tbk
36	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
37	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
38	NIPS	PT Nippres Tbk
39	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
40	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
41	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
42	SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
43	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk
44	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

45	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
46	SRSN	PT Indo Acitama Tbk
47	STAR	PT Star Petrochem Tbk
48	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
49	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
50	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
51	TRIS	PT Trisula International Tbk
52	TRST	PT Trias Sentosa Tbk
53	TSPC	PT Tempo Scan Pasific Tbk
54	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
55	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk
56	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
57	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk



Lampiran 2

Daftar Hasil Pehitungan CETR

Cast Effective Rate (CETR) = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak

			PAJAK	EBIT	
1	ADES	2013	(3.538)	59,194	-0.00006
		2014	(10,490)	41,511	-0.25270
		2015	(11,336)	44,175	-0.25662
		2016	(5,685)	61,636	-0.09224
		2017	(12,853)	51,095	-0.25155
2	AGII	2013	(26,644)	104,777	-0.25429
		2014	(22.709)	85.276	-0.26630
		2015	(22.309)	70.316	-0.31727
		2016	(23.628)	87.915	-0.26876
		2017	(36.222)	133.820	-0.27068
3	AKPI	2013	(31,796,426)	66,416,762	-0.47874
		2014	(26,515,662)	61,206,366	-0.43322
		2015	(23,494,252)	51,138,966	-0.45942
		2016	(23,558,754)	75,952,611	-0.31018
		2017	(18,479,528)	31,813,498	-0.58087
4	AMFG	2013	(112,395.000)	450,753.000	-0.24935
		2014	(139,172.000)	597,807.000	-0.23280
		2015	(122,917.000)	464,263.000	-0.26476
		2016	(88,117.000)	348,561.000	-0.25280
		2017	(2,502.000)	63,589.000	-0.03935
5	APLI	2013	(860,866,361)	2,742,452,624	-0.31339
		2014	(7,015,006,773)	16,706,084,211	-0.41991
		2015	(474,806,076)	2,329,080,812	-0.20386
		2016	(8,254,300,504)	21,163,970,627	-0.39002
		2017	(5,227,037,284)	3,897,608,083	-1.34109
6	ARNA	2013	78,651,688,576	316,349,602,459	0.24862
		2014	86,728,384,322	348,379,437,541	0.24895
		2015	24,304,373,076	95,514,316,424	0.25446
		2016	32,462,388,949	123,838,299,924	0.26214
		2017	44,020,031,391	166,203,941,034	0.26486
7	ASII	2013	(5,226)	27,523	-0.18988
		2014	(5,227)	27,352	-0.1911
		2015	(4,017)	19,630	-0.20464
		2016	(3,951)	22,253	-0.17755
		2017	(6,031)	29,196	-0.20657

8	AUTO	2013	(210,589)	1,268,604	-0.166
		2014	(136,954)	1,091,040	-0.12553
		2015	(110,895)	433,596	-0.25576
		2016	(165,486)	648,907	-0.25502
		2017	(164,155)	711,936	-0.23058
9	BATA	2013	19,384,816	63,758,495	0.304035
		2014	28,299,463	98,925,906	0.286067
		2015	12,924,797	142,444,243	0.090736
		2016	23,070,359	65,302,022	0.353287
		2017	25,869,803	79,524,179	0.325307
10	BUDI	2013	(4,337)	38,549	-0.11251
		2014	14,989	43,488	0.34467
		2015	31,053	52,125	0.59574
		2016	14,208	52,832	0.26893
		2017	15,325	61,016	0.25116
11	CEKA	2013	(21,484,183,371)	86,553,141,929	-0.24822
		2014	(15,865,132,224)	56,866,547,178	-0.27899
		2015	(35,721,906,910)	142,271,353,890	-0.25108
		2016	(36,130,823,829)	285,827,837,455	-0.12641
		2017	(35,775,052,527)	143,195,939,366	-0.24983
12	DLTA	2013	(87,897,926)	358,395,988	-0.24525
		2014	(91,445,380)	379,518,812	-0.24095
		2015	(58,152,543)	250,197,742	-0.23243
		2016	(72,538,386)	327,047,654	-0.22180
		2017	(89,240,218)	369,012,853	-0.24183
13	DPNS	2013	(20,509,600,140)	87,322,830,461	-0.23487
		2014	(2,663,152,461)	17,183,018,745	-0.15499
		2015	(1,972,849,888)	11,832,026,060	-0.16674
		2016	(2,278,665,403)	12,288,056,506	-0.18544
		2017	(1,604,832,494)	7,568,252,565	-0.21205
14	DVLA	2013	(49,960,304)	175,756,777	-0.28426
		2014	(24,936,967)	105,866,443	-0.23555
		2015	(36,543,278)	144,437,708	-0.25300
		2016	(62,333,656)	214,417,056	-0.29071
		2017	(63,898,628)	226,147,921	-0.28255
15	EKAD	2013	(12,537,650,003)	51,988,302,824	-0.24116
		2014	(18,041,856,224)	59,027,719,429	-0.30565
		2015	(19,266,661,660)	66,306,918,116	-0.29057
		2016	(27,763,208,449)	118,449,029,979	-0.23439
		2017	(26,453,643,952)	102,649,309,681	-0.25771
16	GGRM	2013	(1,552,272)	5,936,204	-0.26149
		2014	(1,810,552)	7,205,845	-0.25126

		2015	(2,182,441)	8,635,275	-0.25274
		2016	(2,258,454)	8,931,136	-0.25287
		2017	(2,681,165)	10,436,512	-0.25690
17	HMSP	2013	(3,691,224)	14,509,710	-0.25440
		2014	(3,537,216)	13,718,299	-0.25785
		2015	(3,569,336)	13,932,644	-0.25619
		2016	(4,249,218)	17,011,447	-0.24979
		2017	(4,224,272)	16,894,806	-0.25003
18	ICBP	2013	(733,699)	2,966,990	-0.24729
		2014	(857,044)	3,388,725	-0.25291
		2015	(1,086,486)	4,009,634	-0.27097
		2016	(1,357,953)	4,989,254	-0.27218
		2017	(1,663,388)	5,206,561	-0.31948
19	IGAR	2013	(13,411,886,964)	48,442,303,122	-0.27686
		2014	(20,927,345,985)	75,826,220,743	-0.27599
		2015	(11,820,161,899)	63,236,346,206	-0.18692
		2016	(26,468,958,222)	95,774,588,017	-0.27637
		2017	(23,388,107,927)	95,764,791,063	-0.24422
20	INAI	2013	(6,342,451,995)	11,361,992,726	-0.55822
		2014	(10,767,831,476)	33,183,307,818	-0.32450
		2015	(28,498,388,713)	57,114,061,880	-0.49897
		2016	(22,544,497,747)	58,097,472,991	-0.38805
		2017	(13,640,368,683)	52,292,073,203	-0.26085
21	INCI	2013	(359,007,284)	10,690,815,380	-0.03358
		2014	(330,539,707)	11,358,760,719	-0.0291
		2015	(2,259,981,843)	19,220,641,866	-0.11758
		2016	(3,305,911,836)	13,294,748,095	-0.24866
		2017	(5,523,195,214)	22,077,467,345	-0.25017
22	INDF	2013	(1,252,072)	4,666,958	-0.26828
		2014	(1,828,217)	6,229,297	-0.29349
		2015	(1,730,371)	4,962,084	-0.34872
		2016	(2,532,747)	7,385,228	-0.34295
		2017	(2,513,491)	7,658,554	-0.32819
23	INDS	2013	36,971,608,720	184,580,057,733	0.200301
		2014	40,767,813,500	168,587,326,085	0.24182
		2015	2,200,387,443	4,134,206,595	0.532239
		2016	10,583,748,495	60,140,115,829	0.175985
		2017	46,701,314,660	160,340,854,561	0.291263
24	INTP	2013	1,582,860	6,595,154	0.24000
		2014	1,521,220	6,814,636	0.22323
		2015	1,287,915	5,644,576	0.22817
		2016	275.313	4,145,632	0.00007

		2017	427,456	2,287,274	0.00019
25	ISSP	2013	(47,697)	251,258	-0.18983
		2014	(47,129)	262,024	-0.17987
		2015	(35,906)	194,905	-0.18422
		2016	(36,224)	139,149	-0.26033
		2017	(11,796)	20,430	-0.57739
26	JECC	2013	(8,757,728)	43,435,984	-0.20162
		2014	(9,300,196)	33,144,906	-0.28059
		2015	(6,031,664)	8,496,333	-0.70991
		2016	(43,002,354)	175,425,515	-0.24513
		2017	(28,268,246)	111,623,616	-0.25325
27	JPFA	2013	255,310	895,947	0.284961
		2014	157,703	542,549	0.290671
		2015	173,193	697,677	0.248242
		2016	(594,983)	2,766,591	-0.21506
		2017	(632,785)	1,740,595	-0.36355
28	KAEF	2013	(68,483,102,322)	284,125,432,299	-0.24103
		2014	(79,079,988,771)	315,611,059,635	-0.25056
		2015	(89,354,973,785)	354,904,735,867	-0.25177
		2016	(111,427,947,663)	383,025,924,670	-0.29091
		2017	(118,001,844,961)	449,709,762,422	-0.26240
29	KBLI	2013	(31,649,193,450)	105,179,474,227	-0.30091
		2014	(24,388,746,419)	96,415,603,209	-0.25295
		2015	(34,677,927,328)	150,049,026,298	-0.23111
		2016	(51,790,904,893)	386,129,743,485	-0.13413
		2017	(69,910,827,751)	428,884,879,225	-0.16301
30	KBLM	2013	(2,993,053,470)	10,671,148,829	-0.28048
		2014	(6,871,966,432)	27,370,807,811	-0.25107
		2015	(8,712,277,887)	21,472,643,499	-0.40574
		2016	(14,689,067,767)	34,528,344,006	-0.42542
		2017	(553,314,951)	44,548,264,596	-0.01242
31	KDSI	2013	(11,172,919,812)	47,175,692,006	-0.23684
		2014	(13,488,971,936)	57,978,111,301	-0.23266
		2015	(3,419,704,975)	14,890,268,268	-0.22966
		2016	(16,570,567,066)	63,697,916,133	-0.26014
		2017	(24,397,862,353)	93,363,070,902	-0.26132
32	KLBF	2013	(602,070,267,545)	2,572,522,717,231	-0.23404
		2014	(642,609,966,418)	2,763,700,548,048	-0.23252
		2015	(663,186,962,586)	2,720,881,244,459	-0.24374
		2016	(740,303,526,679)	3,091,188,460,230	-0.23949
		2017	(787,935,315,388)	3,241,186,725,992	-0.24310
33	LION	2013	(20,265,714,260)	85,027,065,076	-0.23834

		2014	(13,856,109,214)	62,857,739,316	-0.22044
		2015	(12,433,164,026)	58,451,801,513	-0.21271
		2016	(12,325,977,643)	54,671,394,698	-0.22546
		2017	(10,892,495,785)	20,175,438,794	-0.53989
34	LMSH	2013	(5,054,792,013)	19,437,691,207	-0.26005
		2014	(3,603,680,847)	11,006,796,283	-0.32741
		2015	(1,862,729,485)	3,807,172,880	-0.48927
		2016	(3,171,213,831)	9,424,028,642	-0.33650
		2017	(4,521,122,499)	17,488,236,349	-0.25852
35	MERK	2013	(59,262,982)	234,707,739	-0.25250
		2014	(54,907,935)	205,958,418	-0.26660
		2015	(51,395,379)	193,940,841	-0.26501
		2016	(61,073,314)	214,916,161	-0.28417
		2017	(61,107,348)	205,784,642	-0.29695
36	MLBI	2013	(321,510)	1,267,187	-0.25372
		2014	(283,495)	1,078,378	-0.26289
		2015	(178,663)	675,572	-0.26446
		2016	(338,057)	1,320,186	-0.25607
		2017	(457,953)	982,129	-0.46629
37	MYOR	2013	342,515,257,778	1,356,073,496,557	0.25258
		2014	119,876,262,161	529,701,030,755	0.22631
		2015	390,261,637,241	1,640,494,765,801	0.23789
		2016	457,007,141,573	1,845,683,269,238	0.24761
		2017	555,930,772,581	2,186,884,603,474	0.25421
38	NIPS	2013	(11,712,057)	45,584,169	-0.25693
		2014	(17,254,715)	67,389,703	-0.25604
		2015	(11,080,809)	41,752,147	-0.26539
		2016	(22,882,997)	88,566,134	-0.25837
		2017	(15,567,442)	59,678,267	-0.26086
39	PYFA	2013	(2,304,128,607)	8,499,928,945	-0.27108
		2014	(1,549,047,114)	4,206,712,519	-0.36823
		2015	(1,467,826,630)	4,554,931,095	-0.32225
		2016	(1,907,090,128)	7,053,407,169	-0.27038
		2017	(2,471,878,605)	9,599,280,773	-0.25751
40	RICY	2013	(7,478,525,013)	16,199,072,002	-0.46166
		2014	(7,515,713,548)	22,627,245,189	-0.33215
		2015	(8,932,127,892)	22,397,841,356	-0.39879
		2016	(9,329,017,013)	23,362,443,532	-0.39932
		2017	(9,250,283,886)	25,808,846,585	-0.35842
41	ROTI	2013	52,789,633,241	210,804,904,162	0.25042
		2014	64,185,387,029	252,762,908,103	0.25394
		2015	107,712,914,648	378,251,615,088	0.28477

		2016	89,639,472,867	369,416,841,698	0.24265
		2017	50,783,313,391	186,147,334,530	0.27281
42	SCCO	2013	(40,196,498,170)	145,158,812,593	-0.27691
		2014	(44,728,341,629)	182,347,242,356	-0.24529
		2015	(46,936,637,110)	206,056,283,235	-0.22779
		2016	(99,008,469,812)	439,602,100,346	-0.22522
		2017	(75,500,057,785)	345,230,356,594	-0.21869
43	SMBR	2013	(88,218,068)	400,401,904	-0.22032
		2014	(66,315,221)	394,651,537	-0.16803
		2015	(89,234,190)	443,414,252	-0.20124
		2016	(90,190,025)	349,280,550	-0.25822
		2017	(62,298,722)	208,947,154	-0.29816
44	SMGR	2013	(1,566,101,213)	6,920,399,734	-0.22630
		2014	(1,509,616,169)	7,077,276,008	-0.21330
		2015	(1,325,482,459)	5,850,923,497	-0.22654
		2016	(549,584,720)	5,084,621,543	-0.10809
		2017	(703,520,449)	2,746,546,363	-0.25615
45	SMSM	2013	(107,817)	458,595	-0.2351
		2014	(119,683)	541,150	-0.22116
		2015	(122,410)	583,717	-0.20971
		2016	(156,016)	658,208	-0.23703
		2017	(165,250)	720,638	-0.22931
46	SRSN	2013	(16,672,659)	32,666,954	-0.51038
		2014	(15,449,746)	30,050,062	-0.51413
		2015	(5,209,875)	20,714,663	-0.25151
		2016	9,367,689	1,688,362	5.548389
		2017	(1,270,641)	18,969,208	-0.06698
47	STAR	2013	(5,805,600,522)	6,375,056,383	-0.91067
		2014	(6,293,650,130)	6,775,346,163	-0.9289
		2015	(2,339,678,558)	2,646,564,128	-0.88404
		2016	(5,466,959,514)	5,929,514,820	-0.92199
		2017	(4,163,674,800)	4,758,401,598	-0.87502
48	TALF	2013	(14,377,590,168)	52,766,643,421	-0.27247
		2014	(19,494,042,908)	77,147,861,862	-0.25268
		2015	(9,828,982,966)	43,546,708,946	-0.22571
		2016	(10,908,035,858)	41,045,743,182	-0.26575
		2017	(10,488,314,450)	31,954,151,234	-0.32823
49	TCID	2013	(58,149,236,079)	218,297,701,912	-0.26638
		2014	(65,114,435,511)	239,428,829,612	-0.27196
		2015	(38,647,669,480)	583,121,947,494	-0.06628
		2016	(59,416,261,296)	221,475,857,643	-0.26827
		2017	(63,956,663,719)	243,083,045,787	-0.26311

50	TOTO	2013	(86,647,351,813)	323,204,864,975	-0.26809
		2014	(88,764,527,617)	384,625,560,340	-0.23078
		2015	(96,337,115,958)	381,573,896,617	-0.25247
		2016	(82,756,308,203)	251,320,891,921	-0.32929
		2017	(98,725,062,966)	377,660,867,510	-0.26141
51	TRIS	2013	(16,088,538,196)	68,073,504,325	-0.23634
		2014	(11,919,895,464)	48,442,710,589	-0.24606
		2015	(14,627,695,195)	58,813,295,821	-0.24871
		2016	(22,734,275,933)	47,947,291,257	-0.47415
		2017	(7,635,098,236)	21,833,987,786	-0.34969
52	TRST	2013	(39,588,224,814)	72,553,777,173	-0.54564
		2014	(33,017,263,179)	63,101,740,322	-0.52324
		2015	(25,783,708,943)	51,097,812,346	-0.5046
		2016	10,599,899,807	23,194,967,133	0.456991
		2017	25,686,000,465	12,513,681,277	2.052633
53	TSPC	2013	191,400,294,291	829,935,403,086	0.23062
		2014	158,439,557,374	742,732,619,498	0.21332
		2015	177,892,281,060	707,110,932,867	0.25158
		2016	173,464,664,107	718,958,200,369	0.24127
		2017	186,750,680,877	744,090,262,873	0.25098
54	ULTJ	2013	(111,592,767,209)	436,720,187,873	-0.25552
		2014	(91,996,013,563)	375,356,927,774	-0.24509
		2015	(177,575,035,200)	700,675,250,229	-0.25343
		2016	(222,657,146,910)	932,482,782,652	-0.23878
		2017	(314,550,000,000)	1,026,231,000,000	-0.30651
55	UNIT	2013	(3,536,882,825)	4,368,738,552	-0.80959
		2014	(5,251,564,986)	5,647,861,282	-0.92983
		2015	(1,275,438,361)	1,661,391,489	-0.76769
		2016	(1,054,706,173)	1,915,481,905	-0.55062
		2017	(477,304,066)	1,539,428,122	-0.31005
56	UNVR	2013	(1,806,183)	7,158,808	-0.25230
		2014	(1,938,199)	7,676,722	-0.25248
		2015	(1,977,685)	7,829,490	-0.25259
		2016	(2,181,213)	8,571,885	-0.25446
		2017	(2,367,099)	9,371,661	-0.25258
57	WIIM	2013	42,797,081,717	175,119,289,578	0.24439
		2014	37,236,710,659	149,541,532,719	0.24901
		2015	46,881,830,192	177,962,941,779	0.26344
		2016	30,372,690,384	136,662,997,252	0.22225
		2017	13,901,517,361	54,491,308,212	0.25511

Lampiran 3

Daftar Hasil Pehitungan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan

Institusional dan Komite Audit tahun 2013 - 2017

			DEWAN KOMISARIS INDEPENDNE			KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL		
			JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN	JUMLAH SELURUH DEWAN KOMISARIS		JUMLAH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	JUMLAH SAHAM BEREDAR	
1	ADES	2013	1	3	33%	542,347,113	589,896,800	0.919393211
		2014	1	3	33%	542,347,113	589,896,800	0.919393211
		2015	1	3	33%	542,347,113	589,896,800	0.919393211
		2016	1	3	33%	539,896,713	589,896,800	0.915239264
		2017	1	3	33%	539,896,713	589,896,800	0.915239264
2	AGII	2013	2	5	40%	504,700	400,630	1.25976587
		2014	2	5	40%	716,700	604,359	1.18588455
		2015	2	6	33%	931,612	811,986	1.14732520
		2016	2	6	33%	2,009,891,000	3,066,660,000	0.65540066
		2017	2	6	33%	2,009,891,000	3,066,660,000	0.65540066
3	AKPI	2013	2	6	33%	3,257,158,810	680,000,000	4.78993943
		2014	2	6	33%	3,257,158,810	680,000,000	4.78993943
		2015	2	6	33%	3,257,158,810	680,000,000	4.78993943
		2016	2	6	33%	3,257,158,810	680,000,000	4.78993943
		2017	2	6	33%	476,175,851	680,000,000	0.70025860
4	AMFG	2013	2	6	33%	367,617,500	434000000	0.84704493
		2014	2	6	33%	367,717,500	434000000	0.84727534
		2015	2	6	33%	368,117,700	434000000	0.84819746
		2016	2	6	33%	368,117,700	434000000	0.84819746
		2017	2	6	33%	368,158,700	434000000	0.84829193
5	APLI	2013	1	3	33%	1,199,899,848	1,500,000,000	0.7999332
		2014	1	3	33%	801,304,000	1,500,000,000	0.5342027
		2015	1	3	33%	801,304,000	1,500,000,000	0.5342027
		2016	1	2	50%	801,304,000	1,500,000,000	0.5342027
		2017	1	3	33%	801,304,000	1,500,000,000	0.5342027
6	ARNA	2013	3	3	100%	3,704,882,000	7,341,430,976	0.50465393
		2014	3	3	100%	4,025,282,100	7,341,430,976	0.54829666
		2015	1	3	33%	3,530,347,500	7,341,430,976	0.48088002
		2016	1	3	33%	1,025,450,000	7,341,430,976	0.13967985
		2017	2	4	50%	1,026,150,000	7,341,430,976	0.13977520

7	ASII	2013	3	10	30%	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50114808
		2014	4	11	36%	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50114808
		2015	4	11	36%	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50114808
		2016	4	12	33%	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50114808
		2017	4	12	33%	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50114808
8	AUTO	2013	4	9	44%	3,855,786,337	4,819,733,000	0.79999999
		2014	3	9	33%	3,855,786,337	4,819,733,000	0.79999999
		2015	3	9	33%	3,855,786,337	4,819,733,000	0.79999999
		2016	3	8	38%	3,855,786,337	4,819,733,000	0.79999999
		2017	3	8	38%	3,855,786,337	4,819,733,000	0.79999999
9	BATA	2013	2	5	40%	1,131,697,400	1,300,000,000	0.87053646
		2014	2	5	40%	1,132,954,900	1,300,000,000	0.87150376
		2015	2	5	40%	1,132,413,500	1,300,000,000	0.87108730
		2016	2	4	50%	1,132,413,500	1,300,000,000	0.87108730
		2017	2	4	50%	1,132,358,500	1,300,000,000	0.87104500
10	BUDI	2013	1	3	33%	2,159,440,831	4,098,997,362	0.52682171
		2014	1	3	33%	2,159,440,831	4,098,997,362	0.52682171
		2015	1	3	33%	2,252,568,821	4,098,997,362	0.54954141
		2016	1	3	33%	2,402,568,831	4,098,997,362	0.58613573
		2017	1	3	33%	2,402,568,831	4,098,997,362	0.58613573
11	CEKA	2013	2	4	50%	273,735,500	297,500,000	0.92011932
		2014	2	4	50%	273,735,500	297,500,000	0.92011932
		2015	2	4	50%	547,471,000	595,000,000	0.92011932
		2016	2	4	50%	547,471,000	595,000,000	0.92011932
		2017	2	4	50%	547,471,000	595,000,000	0.92011932
12	DLTA	2013	2	5	40%	9,341,223	16,013,181	0.58334587
		2014	2	5	40%	9,341,223	16,013,181	0.58334587
		2015	2	5	40%	467,061,150	800,659,050	0.58334587
		2016	2	5	40%	467,061,150	800,659,050	0.58334587
		2017	2	5	40%	467,061,150	800,659,050	0.58334587
13	DPNS	2013	1	3	33%	220,093,451	331,129,952	0.66467394
		2014	1	3	33%	197,485,917	331,129,952	0.59640004
		2015	1	3	33%	198,235,982	331,129,952	0.59866520
		2016	1	3	33%	198,235,982	331,129,952	0.59866520
		2017	1	3	33%	198,235,982	331,129,952	0.59866520
14	DVLA	2013	3	7	43%	1,037,800,912	1,120,000,000	1
		2014	3	7	43%	1,037,800,912	1,120,000,000	1
		2015	2	6	33%	1,037,800,912	1,120,000,000	1
		2016	2	7	29%	1,037,800,912	1,120,000,000	1
		2017	3	7	43%	1,037,800,912	1,120,000,000	1

15	EKAD	2013	1	2	50%	527,200,720	698,775,000	0.754464198
		2014	1	2	50%	527,200,720	698,775,000	0.754464198
		2015	1	2	50%	527,200,720	698,775,000	0.754464198
		2016	1	2	50%	533,289,620	698,775,000	0.763177870
		2017	1	2	50%	536,712,320	698,775,000	0.768076019
16	GGRM	2013	1	3	33%	1,453,589,500	1,924,088,000	0.755469344
		2014	2	4	50%	1,453,589,500	1,924,088,000	0.755469344
		2015	2	4	50%	1,453,589,500	1,924,088,000	0.755469344
		2016	2	4	50%	1,453,589,500	1,924,088,000	0.755469344
		2017	2	4	50%	1,453,589,500	1,924,088,000	0.755469344
17	HMSP	2013	3	6	50%	4,303,168,205	4,383,000,000	0.98178604
		2014	3	6	50%	4,303,168,205	4,383,000,000	0.98178604
		2015	2	5	40%	4,303,768,845	4,652,723,076	0.92500000
		2016	2	5	40%	107,594,221,125	116,318,076,900	0.92500000
		2017	2	5	40%	107,594,221,125	116,318,076,900	0.92500000
18	ICBP	2013	3	7	43%	4,695,839,000	5,830,954,000	0.80532945
		2014	3	7	43%	4,695,839,000	5,830,954,000	0.80532945
		2015	3	6	50%	4,695,839,000	5,830,954,000	0.80532945
		2016	3	6	50%	9,391,678,000	11,661,908,000	0.80532945
		2017	3	6	50%	9,391,678,000	11,661,908,000	0.80532945
19	IGAR	2013	1	3	33%	824,612,420	972,204,500	0.84818823
		2014	1	3	33%	824,612,420	972,204,500	0.84818823
		2015	1	2	50%	824,612,420	972,204,500	0.84818823
		2016	1	3	33%	824,612,420	972,204,500	0.84818823
		2017	1	3	33%	824,612,420	972,204,500	0.84818823
20	INAI	2013	4	9	44%	106,466,900	158,400,000	0.67213952
		2014	4	9	44%	212,933,800	316,800,000	0.67213952
		2015	2	4	50%	213,101,000	316,800,000	0.67266730
		2016	2	4	50%	213,101,000	316,800,000	0.67266730
		2017	2	4	50%	426,202,000	316,800,000	1.34533460
21	INCI	2013	1	3	33%	3,816,041	181,035,556	0.021078959
		2014	1	3	33%	3,816,041	181,035,556	0.021078959
		2015	1	3	33%	3,840,761	181,035,556	0.021215506
		2016	1	3	33%	3,824,095	181,035,556	0.021123447
		2017	1	3	33%	3,973,695	181,035,556	0.021949804
22	INDF	2013	3	8	38%	4,396,103,450	8,780,426,500	0.500670833
		2014	3	8	38%	4,396,103,450	8,780,426,500	0.500670833
		2015	3	8	38%	4,396,103,450	8,780,426,500	0.500670833
		2016	3	8	38%	4,396,103,450	8,780,426,500	0.500670833
		2017	3	8	38%	4,396,103,450	8,780,426,500	0.500670833
23	INDS	2013	1	3	33%	462568166	525000000	0.88108222
		2014	1	3	33%	578210207	656249710	0.88108261

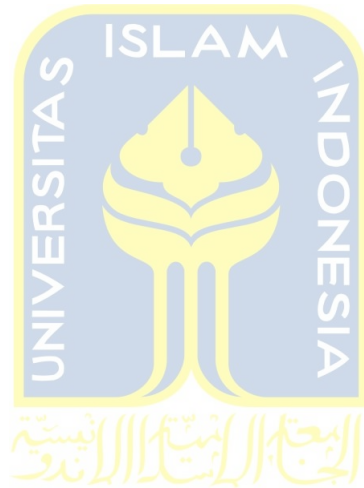
		2015	1	3	33%	578210207	656249710	0.88108261
		2016	1	3	33%	578210207	656249710	0.88108261
		2017	1	3	33%	578210207	656249710	0.88108261
24	INTP	2013	3	7.00	43%	2,357,216,097	3,681,231,699	0.640333532
		2014	3	7.00	43%	2,357,216,097	3,681,231,699	0.640333532
		2015	3	7.00	43%	2,357,216,097	3,681,231,699	0.640333532
		2016	3	7.00	43%	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014315
		2017	3	7.00	43%	1,877,480,863	3,681,231,699	0.510014315
25	ISSP	2013	2	6	33%	4,020,063,930	7,185,992,035	0.55943061
		2014	2	5	40%	4,020,063,930	7,185,992,035	0.55943061
		2015	2	6	33%	4,020,063,930	7,185,992,035	0.55943061
		2016	2	5	40%	4,020,063,930	7,185,992,035	0.55943061
		2017	2	5	40%	4,020,063,930	7,185,992,035	0.55943061
26	JECC	2013	2	3	67%	136,303,300	151,200,000	0.901476852
		2014	2	3	67%	136,303,300	151,200,000	0.901476852
		2015	2	3	67%	136,303,300	151,200,000	0.901476852
		2016	2	4	50%	136,303,300	151,200,000	0.901476852
		2017	2	4	50%	136,303,300	151,200,000	0.901476852
27	JPFA	2013	1	3	33%	6,130,699,735	10,640,198,170	0.576182853
		2014	1	3	33%	6,130,699,735	10,640,198,171	0.576182853
		2015	2	4	50%	6,165,985,835	10,640,198,172	0.579499154
		2016	2	5	40%	7,186,031,335	11,390,398,170	0.630884999
		2017	3	6	50%	7,186,031,335	11,386,157,970	0.63111994
28	KAEF	2013	2	5	40%	5,000,000,000	5,554,000,000	0.90025207
		2014	2	5	40%	5,000,000,000	5,554,000,000	0.90025207
		2015	1	5	20%	5,000,000,000	5,554,000,000	0.90025207
		2016	1	5	20%	5,000,000,000	5,554,000,000	0.90025207
		2017	1	5	20%	5,000,000,000	5,554,000,000	0.90025207
29	KBLI	2013	2	5	40%	2,954,752,814	4,007,235,107	0.737354499
		2014	2	5	40%	2,339,429,000	4,007,235,107	0.583801288
		2015	2	5	40%	2,304,962,599	4,007,235,107	0.575200241
		2016	2	5	40%	2,345,034,899	4,007,235,107	0.585200228
		2017	2	6	33%	2,206,626,999	4,007,235,107	0.550660727
30	KBLM	2013	1	3	33%	829,689,500	1,120,000,000	0.74079420
		2014	1	3	33%	742,000,000	1,120,000,000	0.66250000
		2015	1	3	33%	769,000,000	1,120,000,000	0.68660714
		2016	1	3	33%	853,140,300	1,120,000,000	0.76173241
		2017	1	3	33%	843,498,800	1,120,000,000	0.75312393
31	KDSI	2013	2	4	50%	306,488,500	405,000,000	0.756761728
		2014	2	3	67%	306,488,500	405,000,000	0.756761728
		2015	2	4	50%	306,488,500	405,000,000	0.756761728
		2016	2	4	50%	306,488,500	405,000,000	0.756761728

		2017	2	4	50%	317,691,000	405,000,000	0.78442222
32	KLBF	2013	2	6	33%	26,581,655,085	46,875,122,110	0.5670738
		2014	2	6	33%	26,584,505,085	46,875,122,110	0.5671346
		2015	3	7	43%	26,572,005,085	46,875,122,110	0.5668680
		2016	3	7	43%	26,488,713,385	46,875,122,110	0.5650911
		2017	3	7	43%	26,614,076,385	46,875,122,110	0.5677655
33	LION	2013	1	3	33%	30,012,000	52,016,000	0.57697631
		2014	1	3	33%	30,012,000	52,016,000	0.57697631
		2015	1	3	33%	300,120,000	520,160,000	0.57697631
		2016	1	3	33%	300,120,000	520,160,000	0.57697631
		2017	1	3	33%	300,120,000	520,160,000	0.57697631
34	LMSH	2013	1	3	33%	3,091,700	9,600,000	0.32205208
		2014	1	3	33%	3,091,700	9,600,000	0.32205208
		2015	1	3	33%	30,927,000	96000000	0.32215625
		2016	1	3	33%	30,927,000	96000000	0.32215625
		2017	1	3	33%	30,927,000	96000000	0.32215625
35	MERK	2013	1	3	33%	19,409,746	22,400,000	0.866506518
		2014	1	3	33%	19,409,746	22,400,000	0.866506518
		2015	1	3	33%	388,194,920	448,000,000	0.866506518
		2016	1	3	33%	388,194,920	448,000,000	0.866506518
		2017	1	3	33%	388,194,920	448,000,000	0.866506518
36	MLBI	2013	3	7	43%	17,629,950	21,070,000	0.83673232
		2014	4	8	50%	1,762,995,000	2,107,000,000	0.83673232
		2015	4	7	57%	1,723,151,000	2,107,000,000	0.81782202
		2016	4	7	57%	1,723,151,000	2,107,000,000	0.81782202
		2017	3	6	50%	1,723,151,000	2,107,000,000	0.81782202
37	MYOR	2013	2	5	40%	295,478,850	894,347,989	0.33038465
		2014	2	5	40%	295,478,850	894,347,989	0.33038465
		2015	2	5	40%	295,478,850	894,347,989	0.33038465
		2016	2	5	40%	13,207,471,425	22,358,699,725	0.59070838
		2017	2	5	40%	13,207,471,425	22,358,699,725	0.59070838
38	NIPS	2013	1	3	33%	267,210,000	720,000,000	0.37112500
		2014	1	3	33%	935,237,319	1,486,666,666	0.62908340
		2015	1	3	33%	935,237,319	1,486,666,666	0.62908340
		2016	1	3	33%	974,536,720	1,635,333,332	0.59592543
		2017	1	3	33%	823,641,042	1,635,333,332	0.50365331
39	PYFA	2013	1	3	33%	288,119,974	535,080,000	0.53846149
		2014	1	3	33%	288,119,974	535,080,000	0.53846149
		2015	2	4	50%	288,119,974	535,080,000	0.53846149
		2016	2	4	50%	288,119,974	535,080,000	0.53846149
		2017	2	4	50%	288,119,974	535,080,000	0.53846149
40	RICY	2013	1	3	33%	308,287,600	641,717,510	0.48041014

		2014	1	3	33%	308,287,600	641,717,510	0.480410142
		2015	1	3	33%	308,287,600	641,717,510	0.480410142
		2016	1	3	33%	308,287,600	641,717,510	0.480410142
		2017	1	3	33%	308,287,600	641,717,510	0.480410142
41	ROTI	2013	1	3	33%	3,581,223,500	5,061,800,000	0.7075000
		2014	1	3	33%	3,581,223,500	5,061,800,000	0.7075000
		2015	1	3	33%	3,581,223,500	5,061,800,000	0.7075000
		2016	1	3	33%	3,511,223,500	5,061,800,000	0.6936709
		2017	1	3	33%	4,348,028,207	6,186,488,888	0.7028265
42	SCCO	2013	1	3	33%	138,275,640	205,583,400	0.67260119
		2014	1	3	33%	138,275,640	205,583,400	0.67260119
		2015	1	3	33%	143,275,640	205,583,400	0.69692222
		2016	1	3	33%	146,275,640	205,583,400	0.71151484
		2017	1	3	33%	146,275,640	205,583,400	0.71151484
43	SMBR	2013	3	5	60%	7,500,000,000	9,837,678,500	0.762374983
		2014	3	5	60%	7,500,000,000	9,837,678,500	0.762374983
		2015	3	5	60%	7,500,000,000	9,837,678,500	0.762374983
		2016	3	5	60%	7,500,000,000	9,837,678,500	0.762374983
		2017	1	5	20%	7,500,000,000	9,837,678,500	0.762374983
44	SMGR	2013	3	7	43%	3,025,406	5,931,520	0.51005577
		2014	3	7	43%	3,025,406	5,931,520	0.51005577
		2015	2	7	29%	3,025,406	5,931,520	0.51005577
		2016	2	7	29%	3,025,406	5,931,520	0.51005577
		2017	2	7	29%	3,025,406	5,931,520	0.51005577
45	SMSM	2013	1	3	33%	1,439,668,860	1,439,668,860	1.00000000
		2014	1	3	33%	1,439,668,860	1,439,668,860	1.00000000
		2015	1	3	33%	836,815,927	1,439,668,860	0.58125584
		2016	1	3	33%	3,347,263,708	5,758,675,440	0.58125584
		2017	1	2	50%	3,347,263,708	5,758,675,440	0.58125584
46	SRSN	2013	3	8	38%	4,694,421,652	6,020,000,000	0.77980426
		2014	3	8	38%	4,694,421,652	6,020,000,000	0.77980426
		2015	3	8	38%	4,694,421,652	6,020,000,000	0.77980426
		2016	3	8	38%	4,093,850,845	6,020,000,000	0.68004167
		2017	3	8	38%	1,974,198,800	6,020,000,000	0.32794000
47	STAR	2013	1	2	50%	2,612,000,000	4,800,000,000	0.544166667
		2014	1	2	50%	2,612,000,000	4,800,000,602	0.544166593
		2015	1	2	50%	2,312,925,000	4,800,000,602	0.481859315
		2016	1	2	50%	2,312,925,000	4,800,000,602	0.481859315
		2017	1	2	50%	1,957,425,000	4,800,000,602	0.407796824
48	TALF	2013	1	3	33%	1,342,560,200	1,353,435,000	0.991965037
		2014	1	3	33%	1,342,560,200	1,353,435,000	0.991965037
		2015	1	3	33%	1,345,495,900	1,353,435,000	0.994134111

		2016	1	3	33%	1,345,097,700	1,353,435,000	0.99383989
		2017	1	3	33%	1,345,716,700	1,353,435,000	0.99429725
49	TCID	2013	2	5	40%	190,594,513	201,066,667	0.94791700
		2014	2	5	40%	190,606,401	201,066,667	0.94797613
		2015	3	6	50%	200,793,663	201,066,667	0.99864222
		2016	2	5	40%	200,780,663	201,066,667	0.99857756
		2017	3	6	50%	200,780,663	201,066,667	0.99857756
		2017	3	6	50%	200,780,663	201,066,667	0.99857756
50	TOTO	2013	1	4	25%	476,584,320	495,360,000	0.96209689
		2014	2	5	40%	953,168,640	990,720,000	0.96209689
		2015	2	5	40%	953,168,640	1,032,000,000	0.92361302
		2016	2	5	40%	9,531,686,400	10,320,000,000	0.92361302
		2017	2	5	40%	9,531,686,400	10,320,000,000	0.92361302
51	TRIS	2013	1	3	33%	700,000,000	1,002,598,000	0.69818611
		2014	1	3	33%	700,000,000	1,043,763,025	0.67065031
		2015	1	3	33%	700,000,000	1,045,446,325	0.66957048
		2016	1	3	33%	700,000,000	1,045,446,325	0.66957048
		2017	1	3	33%	700,000,000	347,587,802	2.01387964
52	TRST	2013	1	3	33%	1,676,839,325	2,808,000,000	0.59716500
		2014	2	4	50%	1,676,839,325	2,808,000,000	0.59716500
		2015	2	4	50%	1,591,839,325	2,808,000,000	0.56689435
		2016	2	4	50%	1,591,864,325	2,808,000,000	0.56690325
		2017	1	3	33%	1,622,167,825	2,808,000,000	0.57769509
53	TSPC	2013	3	4	75%	3,480,146,818	4,500,000,000	0.77336596
		2014	3	4	75%	3,488,616,918	4,500,000,000	0.77524820
		2015	3	6	50%	3,517,335,218	4,500,000,000	0.78163004
		2016	3	6	50%	3,528,839,418	4,500,000,000	0.78418653
		2017	3	5	60%	3,551,607,218	4,500,000,000	0.78924604
54	ULTJ	2013	1	3	33%	1,345,697,026	2,888,382,000	0.46589994
		2014	1	3	33%	1,345,697,026	2,888,382,000	0.46589994
		2015	1	3	33%	1,285,697,026	2,888,382,000	0.44512707
		2016	1	3	33%	1,071,348,565	2,888,382,000	0.37091650
		2017	1	3	33%	4,258,588,260	11,553,528,000	0.36859635
55	UNIT	2013	1	2	50%	41,323,425	75,422,200	0.54789471
		2014	1	2	50%	41,323,425	75,422,200	0.54789471
		2015	1	2	50%	41,323,425	75,422,200	0.54789471
		2016	1	2	50%	41,323,425	75,422,201	0.54789471
		2017	1	2	50%	22,173,175	75,422,201	0.29398737
56	UNVR	2013	4	5	80%	6,484,877,500	7,630,000,000	0.84991841
		2014	4	5	80%	6,484,877,500	7,630,000,000	0.84991841
		2015	4	5	80%	7,547,435,110	7,630,000,000	0.98917891
		2016	4	5	80%	7,545,510,195	7,630,000,000	0.98892663
		2017	4	5	80%	7,555,834,685	7,630,000,000	0.99027977

57	WIIM	2013	1	3	33%	472,018,070	2,099,873,760	0.22478402
		2014	1	3	33%	575,904,570	2,099,873,760	0.27425676
		2015	1	3	33%	472,018,070	2,099,873,760	0.22478402
		2016	1	3	33%	580,018,070	2,099,873,760	0.27621569
		2017	1	3	33%	108,000,000	2,099,873,760	0.05143166



LAMPIRAN 4

Daftar Hasil Perhitungan Profitabilitas Dan Leverage tahun 2013 -

2017

			PROFITABILITAS			LEVERAGE		
			LABA BERSIH SETELAH PAJAK	TOTAL ASET		HUTANG	MODAL	
1	ADES	2013	55,656	441,064	0.12619	176,286	264,778	0.66579
		2014	31,021	504,865	0.06144	209,066	295,799	0.70678
		2015	32,839	653,224	0.05027	324,855	328,369	0.98930
		2016	55,951	767,479	0.07290	383,091	384,388	0.99663
		2017	38,242	840,236	0.04551	417,225	423,011	0.98632
2	AGII	2013	78,133	2,555,918.000	0.03057	1,703,256	792,660,670	0.00215
		2014	62,567	3,487,197.000	0.00002	2,237,721	1,103,734	2.02741
		2015	48,007	4,953,451.000	0.00001	3,074,584	1,714,769	1.79300
		2016	64,287	5,847,722.000	0.00001	2,996,929	2,760,840	1.08551
		2017	97,598	6,403,543.000	0.00002	2,971,605	3,358,010	0.88493
3	AKPI	2013	34,620,336	2,084,567,189	0.01661	1,055,230,963	1,029,336,226	1.02516
		2014	34,690,704	2,227,042,590	0.01558	1,191,196,937	1,035,845,653	1.14998
		2015	27,644,714	2,883,143,132	0.00959	1,775,577,239	1,107,565,893	1.60313
		2016	52,393,857	2,615,909,190	0.02003	1,495,874,021	1,120,035,169	1.33556
		2017	13,333,970	2,745,325,833	0.00486	1,618,713,342	1,126,612,491	1.43680
4	AMFG	2013	338,358.000	3,539,393	0.09560	778,666	2,760,727	0.28205
		2014	458,635.000	3,918,391	0.11705	733,749	3,184,642	0.23040
		2015	341,346.000	4,270,275	0.07994	880,052	3,390,223	0.25959
		2016	260,444.000	5,504,890	0.04731	1,905,626	3,599,264	0.52945
		2017	38,569.000	6,267,816	0.00615	2,718,939	3,548,877	0.76614
5	APLI	2013	1,881,586,263	303,594,490,546	0.00620	85,871,301,621	217,723,188,925	0.39441
		2014	9,691,077,438	273,126,657,794	0.03548	48,553,666,580	224,572,991,214	0.21620
		2015	1,854,274,736	308,620,387,248	0.00601	87,059,306,497	221,561,080,751	0.39294
		2016	12,909,670,123	382,461,777,452	0.03375	116,726,057,995	265,735,719,457	0.43926
		2017	(1,329,429,201)	398,698,779,619	-0.00333	171,514,782,371	227,183,997,248	0.75496
6	ARNA	2013	237,697,913,833	1,135,244,802,060	0.20938	366,754,918,531	768,489,883,529	0.47724
		2014	261,651,053,219	1,259,175,442,875	0.20780	346,944,901,743	912,230,541,132	0.38033
		2015	71,209,943,348	1,430,779,475,454	0.04977	536,050,998,398	894,728,477,056	0.59912
		2016	91,375,910,975	1,543,216,299,146	0.05921	595,128,097,887	948,088,201,259	0.62771
		2017	122,183,909,643	1,601,346,561,573	0.07630	571,946,769,034	1,029,399,792,539	0.55561
7	ASII	2013	22,297	213,994	0.10419	107,806	106,188	1.01524
		2014	22,125	236,029	0.09374	115,705	120,324	0.96161
		2015	15,613	245,435	0.06361	118,902	126,533	0.93969
		2016	18,302	261,855	0.06989	121,949	139,906	0.87165

		2017	23,165	295,646	0.07835	139,317	156,329	0.89118
8	AUTO	2013	1,058,015	12,617,678	0.08385	3,058,924	9,558,754	0.32001
		2014	954,086	14,387,568	0.06631	4,244,862	10,142,706	0.41851
		2015	322,701	14,339,110	0.02250	4,195,684	10,143,426	0.41364
		2016	483,421	14,612,274	0.03308	4,075,716	10,536,558	0.38682
		2017	547,781	14,762,309	0.03711	4,003,233	10,759,076	0.37208
9	BATA	2013	44,373,679	680,685,060	0.06519	283,831,895	396,853,165	0.71521
		2014	70,781,440	774,891,087	0.09134	345,775,482	429,115,605	0.80579
		2015	129,519,446	795,257,974	0.16286	248,070,766	547,187,208	0.45336
		2016	42,231,663	804,742,917	0.05248	247,587,638	557,155,279	0.44438
		2017	53,654,376	855,691,231	0.06270	276,382,503	579,308,728	0.47709
10	BUDI	2013	42,886	2,382,875	0.01800	1,497,754	885,121	1.69215
		2014	28,499	2,476,982	0.01151	1,563,631	913,351	1.71197
		2015	21,072	3,265,953	0.00645	2,160,702	1,105,251	1.95494
		2016	38,624	2,931,807	0.01317	1,766,825	1,164,982	1.51661
		2017	45,691	2,939,456	0.01554	1,744,756	1,194,700	1.46041
11	CEKA	2013	65,068,958,558	1,069,627,299,747	0.06083	541,352,365,829	528,274,933,918	1.02475
		2014	41,001,414,954	1,284,150,037,341	0.03193	746,598,865,219	537,551,172,122	1.38889
		2015	106,549,446,980	1,485,826,210,015	0.07171	845,932,695,663	639,893,514,352	1.32199
		2016	249,697,013,626	1,425,964,152,418	0.17511	538,044,038,690	887,920,113,728	0.60596
		2017	107,420,886,839	1,392,636,444,501	0.07713	489,592,257,434	903,044,187,067	0.54216
12	DLTA	2013	270,498,062	867,040,802	0.31198	190,482,809	676,557,993	0.28155
		2014	288,073,432	991,947,134	0.29041	227,473,881	764,473,253	0.29756
		2015	192,045,199	1,038,321,916	0.18496	188,700,435	849,621,481	0.22210
		2016	254,509,268	1,197,796,650	0.21248	185,422,642	1,012,374,008	0.18316
		2017	279,772,635	1,340,842,765	0.20865	196,197,372	1,144,645,393	0.17140
13	DPNS	2013	66,813,230,321	256,372,669,050	0.26061	32,944,704,261	223,427,964,789	0.14745
		2014	14,519,866,284	268,877,322,944	0.05400	32,794,800,672	236,082,522,272	0.13891
		2015	9,859,176,172	274,483,110,371	0.03592	33,187,031,327	241,296,079,044	0.13754
		2016	10,009,391,103	296,129,565,784	0.03380	32,865,162,199	263,264,403,585	0.12484
		2017	5,963,420,071	308,491,173,960	0.01933	40,655,786,593	267,835,387,367	0.15179
14	DVLA	2013	125,796,473	1,190,054,288	0.10571	275,351,336	914,702,952	0.30103
		2014	80,929,476	1,236,247,525	0.06546	273,816,042	962,431,483	0.28450
		2015	107,894,430	1,376,278,237	0.07840	402,760,903	973,517,334	0.41372
		2016	152,083,400	1,531,365,558	0.09931	451,785,946	1,079,579,612	0.41848
		2017	162,249,293	1,640,886,147	0.09888	524,586,078	1,116,300,069	0.46993
15	EKAD	2013	39,450,652,821	343,601,504,089	0.11482	105,893,942,734	237,707,561,355	0.44548
		2014	40,985,863,205	411,726,182,748	0.09955	143,820,128,736	267,906,054,012	0.53683
		2015	47,040,256,456	389,691,595,500	0.12071	97,730,178,889	291,961,416,611	0.33474
		2016	90,685,821,530	702,508,630,708	0.12909	110,503,822,983	592,004,807,725	0.18666
		2017	76,195,665,729	796,767,646,172	0.09563	133,949,920,707	662,817,725,465	0.20209
16	GGRM	2013	4,383,932	50,770,251	0.08635	21,353,980	29,416,271	0.72592

		2014	5,395,293	58,220,600	0.09267	24,991,880	33,228,720	0.75212
		2015	6,452,834	63,505,413	0.10161	25,497,504	38,007,909	0.67085
		2016	6,672,682	62,951,634	0.10600	23,387,406	39,564,228	0.59113
		2017	7,755,347	66,759,930	0.11617	24,572,266	42,187,664	0.58245
17	HMSP	2013	10,818,486	27,404,594	0.39477	13,249,559	14,155,035	0.93603
		2014	10,181,083	28,380,630	0.35873	14,882,516	13,498,114	1.10256
		2015	10,363,308	38,010,724	0.27264	5,994,664	32,016,060	0.18724
		2016	12,762,229	42,508,277	0.30023	8,333,263	34,175,014	0.24384
		2017	12,670,534	43,141,063	0.29370	9,028,078	34,112,985	0.26465
18	ICBP	2013	2,233,291	21,267,470	0.10501	8,001,739	13,265,731	0.60319
		2014	2,531,681	24,910,211	0.10163	9,870,264	15,039,947	0.65627
		2015	2,923,148	26,560,624	0.11006	10,173,713	16,386,911	0.62084
		2016	3,631,301	28,901,948	0.12564	10,401,125	18,500,823	0.56220
		2017	3,543,173	31,619,514	0.11206	11,295,184	20,324,330	0.55575
19	IGAR	2013	35,030,416,158	314,746,644,499	0.11130	89,003,869,709	225,742,774,790	0.39427
		2014	54,898,874,758	349,894,783,575	0.15690	86,443,556,430	263,451,227,145	0.32812
		2015	51,416,184,307	383,936,040,590	0.13392	73,471,782,127	310,464,258,463	0.23665
		2016	69,305,629,795	439,465,673,296	0.15770	65,716,637,766	373,749,035,530	0.17583
		2017	72,376,683,136	513,022,591,574	0.14108	71,075,842,431	441,946,749,143	0.16082
20	INAI	2013	5,019,540,731	765,881,409,376	0.00655	639,563,606,250	126,317,803,126	5.06313
		2014	22,415,476,342	893,663,745,450	0.02508	1,330,259,296,537	121,742,186,500	#####
		2015	28,615,673,167	1,330,259,296,537	0.02151	1,090,438,393,880	239,820,902,657	4.54689
		2016	35,552,975,244	1,339,032,413,455	0.02655	1,081,015,810,782	258,016,602,673	4.18971
		2017	38,651,704,520	1,213,916,545,120	0.03184	936,511,874,370	277,404,670,750	3.37598
21	INCI	2013	10,331,808,096	136,142,063,219	0.07589	10,050,376,983	126,091,686,236	0.07971
		2014	11,028,221,012	147,992,617,351	0.07452	10,872,710,103	137,119,907,248	0.07929
		2015	16,960,660,023	169,546,066,314	0.10004	15,494,757,317	154,051,308,997	0.10058
		2016	9,988,836,259	269,351,381,344	0.03708	26,524,918,593	242,826,462,751	0.10923
		2017	16,554,272,131	303,788,390,330	0.05449	35,408,565,186	268,379,825,144	0.13193
22	INDF	2013	3,414,886	78,092,789	0.04373	39,719,660	38,373,129	1.03509
		2014	4,401,080	85,938,885	0.05121	44,710,509	41,228,376	1.08446
		2015	3,231,713	91,831,526	0.03519	48,709,933	43,121,593	1.12959
		2016	4,852,481	82,174,515	0.05905	38,233,092	43,941,423	0.87009
		2017	5,145,063	87,939,488	0.05851	41,182,764	46,756,724	0.88079
23	INDS	2013	147,608,449,013	2,196,518,364,473	0.06720	443,652,749,965	1,752,865,614,508	0.25310
		2014	127,819,512,585	2,282,666,078,493	0.05600	459,998,606,660	1,822,667,471,833	0.25238
		2015	1,933,819,152	2,553,928,346,219	0.00076	634,889,428,231	1,919,038,917,988	0.33084
		2016	49,556,367,334	2,477,272,502,538	0.02000	409,208,624,907	2,068,063,877,631	0.19787
		2017	113,639,539,901	2,434,617,337,849	0.04668	289,798,419,319	2,144,818,918,530	0.13512
24	INTP	2013	5,012,294	26,607,241	0.18838	3,629,554	22,977,687	0.15796
		2014	5,293,416	28,884,635	0.18326	4,100,000	24,785,000	0.16542
		2015	4,356,661	27,638,360	0.15763	3,772,410	23,865,950	0.15807

		2016	3,870,319	30,150,580	0.12837	4,011,877	26,138,703	0.15348
		2017	1,859,818	28,863,676	0.06443	4,307,169	24,556,507	0.17540
25	ISSP	2013	203,561	4,393,577	0.04633	2,459,118	1,934,459	1.27122
		2014	214,895	5,443,158	0.03948	3,138,324	2,304,834	1.36163
		2015	158,999	5,448,447	0.02918	2,894,972	2,553,475	1.13374
		2016	102,925	6,041,811	0.01704	3,396,754	2,645,057	1.28419
		2017	8,634	6,269,365	0.00138	3,428,424	2,840,941	1.20679
26	JECC	2013	22,553,551	1,239,821,716	0.01819	1,052,583,258	147,660,344	7.12841
		2014	23,844,710	1,062,476,023	0.02244	846,116,408	171,355,054	4.93780
		2015	2,464,669	1,358,464,081	0.00181	990,707,822	367,756,259	2.69393
		2016	132,423,161	1,587,210,576	0.08343	1,116,872,234	470,338,342	2.37461
		2017	83,355,370	1,927,985,352	0.04323	1,380,623,870	547,361,482	2.52233
27	JPFA	2013	640,637	14,917,590	0.04295	9,672,368	5,245,222	1.84403
		2014	384,846	15,730,435	0.02447	10,440,441	5,289,994	1.97362
		2015	524,484	17,159,466	0.03057	11,049,774	6,109,692	1.80856
		2016	2,171,608	19,251,026	0.11280	9,878,062	9,372,964	1.05389
		2017	1,107,810	21,088,870	0.05253	11,293,242	9,795,628	1.15289
28	KAEF	2013	215,642,329,977	2,471,939,548,890	0.08724	847,584,859,909	1,624,354,688,981	0.52180
		2014	236,531,070,864	2,968,184,626,297	0.07969	1,157,040,676,384	1,811,143,949,913	0.63885
		2015	265,549,762,082	3,434,879,313,034	0.07731	1,378,319,672,511	2,056,559,640,523	0.67021
		2016	271,597,947,663	4,612,562,541,064	0.05888	2,341,155,131,870	2,271,407,409,194	1.03071
		2017	331,707,917,461	6,096,148,972,534	0.05441	3,523,628,217,406	2,572,520,755,128	1.36972
29	KBLI	2013	73,530,280,777	1,337,022,291,951	0.05500	450,372	886,650	0.50795
		2014	72,026,856,790	1,340,881,252,563	0.05372	396,594	940,757	0.42157
		2015	115,371,098,970	1,551,799,840,976	0.07435	524,438	1,027,362	0.51047
		2016	334,338,838,592	1,871,422,416,044	0.17865	550,077	1,321,346	0.41630
		2017	358,974,051,474	3,013,760,616,985	0.11911	1,227,014	1,786,746	0.68673
30	KBLM	2013	7,678,095,359	654,296,256,935	0.01173	384,632,097,122	269,664,159,813	1.42634
		2014	20,498,841,379	647,249,655,440	0.03167	356,961,782,298	290,287,873,142	1.22968
		2015	12,760,365,612	654,385,717,061	0.01950	357,910,337,055	296,475,380,006	1.20722
		2016	21,245,022,916	639,091,366,917	0.03324	318,436,989,653	320,655,277,264	0.99308
		2017	43,995,000,000	1,235,199,000,000	0.03562	443,770,000,000	791,429,000,000	0.56072
31	KDSI	2013	36,002,772,194	850,233,842,186	0.04234	498,224,954,613	352,008,887,573	1.41538
		2014	44,489,139,365	952,177,443,047	0.04672	555,679,416,109	396,498,026,938	1.40147
		2015	11,470,563,293	1,177,093,668,866	0.00974	798,172,379,792	378,921,289,074	2.10643
		2016	47,127,349,067	1,142,273,020,550	0.04126	722,488,734,446	419,784,286,104	1.72110
		2017	68,965,208,549	1,328,291,727,616	0.05192	842,752,226,515	485,539,501,101	1.73570
32	KLBF	2013	1,970,452,449,686	11,315,061,275,026	0.17414	2,815,103,309,451	8,499,957,965,575	0.33119
		2014	2,121,090,581,630	12,425,032,367,729	0.17071	2,607,556,689,283	9,817,475,678,446	0.26560
		2015	2,057,694,281,873	13,696,417,381,439	0.15024	2,758,131,396,170	10,938,285,985,269	0.25215
		2016	2,350,884,933,551	15,226,009,210,657	0.15440	2,762,162,069,572	12,463,847,141,085	0.22161
		2017	2,453,251,410,604	16,616,239,416,335	0.14764	2,722,207,633,646	13,894,031,782,689	0.19593

33	LION	2013	64,761,350,816	498,567,897,161	0.12989	82,783,559,318	415,784,337,843	0.19910
		2014	49,001,630,102	605,165,911,239	0.08097	179,232,241,844	425,933,669,395	0.42080
		2015	46,018,637,487	639,330,150,373	0.07198	184,730,654,202	454,599,496,171	0.40636
		2016	42,345,417,055	685,812,995,987	0.06174	215,209,902,816	470,603,093,171	0.45731
		2017	9,282,943,009	681,937,947,736	0.01361	229,630,859,719	452,307,088,017	0.50769
34	LMSH	2013	14,382,899,194	141,697,598,705	0.10150	31,229,504,329	110,468,094,376	0.28270
		2014	7,403,115,436	141,034,984,628	0.05249	28,441,933,937	112,593,050,691	0.25261
		2015	1,944,443,395	133,782,751,041	0.01453	21,341,373,897	112,441,377,144	0.18980
		2016	6,252,814,811	162,828,169,250	0.03840	45,511,700,128	117,316,469,122	0.38794
		2017	12,967,113,850	161,163,426,840	0.08046	31,541,423,763	129,622,003,077	0.24333
35	MERK	2013	175,444,757	696,946,318	0.25173	184,727,696	512,218,622	0.36064
		2014	151,050,483	711,055,830	0.21243	166,811,511	544,244,319	0.30650
		2015	142,545,462	641,646,818	0.22216	168,103,536	473,543,282	0.35499
		2016	153,842,847	743,934,894	0.20680	161,262,425	582,672,469	0.27676
		2017	144,677,294	847,006,544	0.17081	231,569,103	615,437,441	0.37627
36	MLBI	2013	945,677	1,462,234	0.64673	707,127	755,107	0.93646
		2014	794,883	2,231,051	0.35628	1,677,254	553,797	3.02864
		2015	496,909	2,100,853	0.23653	1,334,373	766,480	1.74091
		2016	1,780,020	2,275,038	0.78241	1,454,398	820,640	1.77227
		2017	1,322,067	2,510,078	0.52670	1,445,173	1,064,905	1.35709
37	MYOR	2013	1,013,558,238,779	9,710,223,454,000	0.10438	5,816,323,334,823	3,893,900,119,177	1.49370
		2014	409,824,768,594	10,291,108,029,334	0.03982	6,190,553,036,545	4,100,554,992,789	1.50969
		2015	1,250,233,128,560	11,342,715,686,221	0.11022	6,148,255,759,034	5,194,459,927,187	1.18362
		2016	1,388,676,127,665	12,922,421,859,142	0.10746	6,657,165,872,077	6,265,255,987,065	1.06255
		2017	1,630,953,830,893	14,915,849,800,251	0.10934	7,561,503,434,179	7,354,346,366,072	1.02817
38	NIPS	2013	33,872,112	798,407,625	0.04242	562,461,853	235,945,772	2.38386
		2014	50,134,988	1,206,854,399	0.04154	630,960,175	575,894,224	1.09562
		2015	30,671,339	1,547,720,090	0.01982	938,717,411	609,002,679	1.54140
		2016	65,683,137	1,777,956,390	0.03694	935,375,496	842,580,894	1.11013
		2017	44,110,825	1,897,962,447	0.02324	1,018,449,877	879,512,570	1.15797
39	PYFA	2013	6,195,800,338	175,118,921,406	0.03538	81,217,648,190	93,901,273,216	0.86493
		2014	2,657,665,405	172,736,624,689	0.01539	76,177,686,068	96,558,938,621	0.78892
		2015	3,087,104,465	159,951,537,229	0.01930	58,729,478,032	101,222,059,197	0.58020
		2016	5,146,317,041	167,062,795,608	0.03080	61,554,005,181	105,508,790,427	0.58340
		2017	7,127,402,168	159,563,931,041	0.04467	50,707,930,330	108,856,000,711	0.46583
40	RICY	2013	8,720,546,989	1,109,865,329,758	0.00786	728,675,060,830	381,190,268,929	1.91158
		2014	15,124,699,961	1,170,752,424,106	0.01292	774,439,342,861	396,313,081,245	1.95411
		2015	13,465,713,464	1,198,193,867,892	0.01124	798,114,824,380	400,079,043,512	1.99489
		2016	14,033,426,519	1,288,683,925,066	0.01089	876,184,855,001	412,499,070,065	2.12409
		2017	16,558,562,698	1,374,444,788,282	0.01205	944,179,416,586	430,265,371,696	2.19441
41	ROTI	2013	158,015,270,921	1,822,689,047,108	0.08669	1,035,351,397,437	787,337,649,671	1.31500
		2014	188,577,521,074	2,142,894,276,216	0.08800	1,182,771,921,472	960,122,354,744	1.23190

		2015	270,538,700,440	2,706,323,637,034	0.09997	1,517,788,685,162	1,188,534,951,872	1.27702
		2016	279,777,368,831	2,919,640,858,718	0.09583	1,476,889,086,692	1,442,751,772,026	1.02366
		2017	135,364,021,139	4,559,573,709,411	0.02969	1,739,467,993,982	2,820,105,715,429	0.61681
42	SCCO	2013	104,962,314,423	1,762,032,300,123	0.05957	1,054,421,170,969	707,611,129,154	1.49011
		2014	137,618,900,727	1,656,007,190,010	0.08310	841,614,670,129	814,392,519,881	1.03343
		2015	159,119,646,125	1,773,144,328,632	0.08974	850,791,824,810	922,352,503,822	0.92242
		2016	340,593,630,534	2,449,935,491,586	0.13902	1,229,514,818,362	1,220,420,673,224	1.00745
		2017	269,730,298,809	4,014,244,589,706	0.06719	1,286,017,105,712	2,728,227,483,994	0.47137
43	SMBR	2013	312,183,836	2,711,416,335	0.11514	244,459,581	2,466,956,754	0.09909
		2014	328,336,316	2,926,360,857	0.11220	209,113,746	2,717,247,111	0.07696
		2015	354,180,062	3,268,667,933	0.10836	319,315,349	2,949,352,584	0.10827
		2016	259,090,525	4,368,876,996	0.05930	1,248,119,294	3,120,757,702	0.39994
		2017	146,648,432	5,060,337,247	0.02898	1,647,477,388	3,412,859,859	0.48273
44	SMGR	2013	5,354,298,521	30,792,884,092	0.17388	8,988,908,217	21,803,975,875	0.41226
		2014	5,567,659,839	30,833,102,777	0.18057	9,081,620,983	21,751,481,794	0.41752
		2015	4,525,441,038	38,153,118,932	0.11861	10,712,320,531	27,440,798,401	0.39038
		2016	4,535,036,823	44,226,895,982	0.10254	13,652,504,525	30,574,391,457	0.44653
		2017	2,043,025,914	48,963,502,966	0.04173	18,524,450,664	30,439,052,302	0.60858
45	SMSM	2013	350,777	1,701,103	0.20621	694,304	1,006,799	0.68962
		2014	421,467	1,749,395	0.24092	602,558	1,146,837	0.52541
		2015	461,307	2,220,108	0.20779	779,860	1,440,248	0.54148
		2016	502,192	2,254,740	0.22273	674,685	1,580,055	0.42700
		2017	555,388	2,443,341	0.22731	615,157	1,828,184	0.33649
46	SRSN	2013	15,994,295	421,104,664	0.03798	107,695,369	313,409,295	0.34363
		2014	14,600,316	464,949,206	0.03140	140,918,993	324,030,213	0.43489
		2015	15,504,788	574,073,314	0.02701	233,993,478	340,079,836	0.68805
		2016	11,056,051	717,149,704	0.01542	315,096,071	402,053,633	0.78372
		2017	17,698,567	652,726,454	0.02711	237,220,555	415,505,899	0.57092
47	STAR	2013	569,455,861	749,402,740,231	0.00076	259,578,391,395	489,824,348,836	0.52994
		2014	481,696,033	775,917,827,931	0.00062	285,744,500,913	490,173,327,018	0.58295
		2015	306,885,570	729,020,553,284	0.00042	239,344,544,398	489,676,008,886	0.48878
		2016	462,555,306	690,187,353,961	0.00067	200,161,402,637	490,025,951,324	0.40847
		2017	594,726,798	614,705,038,056	0.00097	124,422,750,504	490,282,287,552	0.25378
48	TALF	2013	38,389,053,253	341,414,650,168	0.11244	69,103,582,862	272,311,067,306	0.25377
		2014	57,653,818,954	431,533,296,503	0.13360	104,951,997,743	326,581,298,760	0.32137
		2015	33,717,725,980	434,210,376,664	0.07765	84,008,353,472	350,202,023,192	0.23989
		2016	30,137,707,324	881,673,021,959	0.03418	129,777,537,129	751,895,484,830	0.17260
		2017	21,465,836,784	921,240,988,517	0.02330	155,076,156,734	766,164,831,783	0.20241
49	TCID	2013	160,148,465,833	1,465,952,460,752	0.10925	282,961,770,795	1,182,990,689,957	0.23919
		2014	174,314,394,101	1,853,235,343,636	0.09406	569,730,901,368	1,283,504,442,268	0.44389
		2015	544,474,278,014	2,082,096,848,703	0.26150	367,225,370,670	1,714,871,478,033	0.21414
		2016	162,059,596,347	2,185,101,038,101	0.07417	401,942,530,776	1,783,158,507,325	0.22541

		2017	179,126,382,068	2,361,807,189,430	0.07584	503,480,853,006	1,858,326,336,424	0.27093
50	TOTO	2013	236,557,513,162	1,746,177,682,568	0.13547	710,527,268,893	1,035,650,413,675	0.68607
		2014	295,861,032,723	2,027,288,693,678	0.14594	796,096,371,054	1,231,192,322,624	0.64661
		2015	285,236,780,659	2,439,540,859,205	0.11692	947,997,940,099	1,491,542,919,106	0.63558
		2016	168,564,583,718	2,581,440,938,262	0.06530	1,057,566,418,720	1,523,874,519,542	0.69400
		2017	278,935,804,544	2,826,490,815,501	0.09869	1,132,699,218,954	1,693,791,596,547	0.66874
51	TRIS	2013	51,984,966,129	475,428,240,024	0.10934	172,797,615,708	302,630,624,316	0.57099
		2014	36,522,815,125	523,900,642,605	0.06971	214,390,227,222	309,510,415,383	0.69268
		2015	44,185,600,626	574,346,433,075	0.07693	245,138,356,170	329,208,076,905	0.74463
		2016	25,213,015,324	639,701,164,511	0.03941	293,073,984,034	346,627,180,477	0.84550
		2017	14,198,889,550	544,968,319,987	0.02605	188,736,733,204	356,231,586,783	0.52981
52	TRST	2013	32,965,552,359	3,260,919,505,192	0.01011	1,551,242,364,818	1,709,677,140,374	0.90733
		2014	30,084,477,143	3,261,285,495,052	0.00922	1,499,792,311,890	1,761,493,183,162	0.85143
		2015	25,314,103,403	3,357,359,499,954	0.00754	1,400,438,809,900	1,956,920,690,054	0.71563
		2016	33,794,866,940	3,290,596,224,286	0.01027	1,358,241,040,272	1,932,355,184,014	0.70289
		2017	38,199,681,742	3,332,905,936,010	0.01146	1,357,336,438,524	1,975,569,497,486	0.68706
53	TSPC	2013	638,535,108,795	5,407,957,915,805	0.11807	1,545,006,061,565	3,862,951,854,240	0.39995
		2014	584,293,062,124	5,592,730,492,960	0.10447	1,460,391,494,410	4,132,338,998,550	0.35341
		2015	529,218,651,807	6,284,729,099,203	0.08421	1,947,588,124,083	4,337,140,975,120	0.44905
		2016	545,493,536,262	6,585,807,349,438	0.08283	1,950,534,206,746	4,635,273,142,692	0.42080
		2017	557,339,581,996	7,434,900,309,021	0.07496	2,352,891,899,876	5,082,008,409,145	0.46298
54	ULTJ	2013	325,127,420,664	2,811,620,982,142	0.11564	796,474,448,056	2,015,146,534,086	0.39524
		2014	283,360,914,211	2,917,083,567,355	0.09714	651,985,807,625	2,265,097,759,730	0.28784
		2015	523,100,215,029	3,539,995,910,248	0.14777	742,490,216,326	2,797,505,693,922	0.26541
		2016	709,825,635,742	4,239,199,641,365	0.16744	749,966,146,582	3,489,233,494,783	0.21494
		2017	711,681,000,000	5,186,940,000,000	0.13721	978,185,000,000	4,208,755,000,000	0.23242
55	UNIT	2013	831,855,726	459,118,935,528	0.00181	217,861,673,225	241,257,262,302	0.90303
		2014	396,296,296	440,727,374,151	0.00090	199,073,815,553	241,653,558,598	0.82380
		2015	385,953,128	460,539,382,206	0.00084	217,565,067,467	242,974,314,739	0.89542
		2016	860,775,733	432,913,180,372	0.00199	188,891,359,540	244,021,820,832	0.77408
		2017	1,062,124,056	426,384,622,878	0.00249	181,126,294,572	245,258,328,306	0.73851
56	UNVR	2013	5,352,625	13,348,188	0.40100	9,093,518	4,254,670	2.13730
		2014	5,738,523	14,280,670	0.40184	9,681,888	4,598,782	2.10532
		2015	5,851,805	15,729,945	0.37202	10,902,585	4,827,360	2.25850
		2016	6,390,672	16,745,695	0.38163	12,041,437	4,704,258	2.55969
		2017	7,004,562	18,906,413	0.37049	13,733,025	5,173,388	2.65455
57	WIIM	2013	132,322,207,861	1,229,011,260,881	0.10767	447,651,956,356	781,359,304,525	0.57291
		2014	112,304,822,060	1,332,907,675,785	0.08426	478,482,577,195	854,425,098,590	0.56001
		2015	131,081,111,587	1,342,700,045,391	0.09763	398,991,064,485	943,708,980,906	0.42279
		2016	106,290,306,868	1,353,634,132,275	0.07852	362,540,740,471	991,093,391,804	0.36580
		2017	40,589,790,851	1,225,712,093,041	0.03312	247,620,731,930	978,091,361,111	0.25317

Lampiran 5

Daftar Hasil Perhitungan Likuiditas dan Sales Growth tahun 2013 -

2017

			LIKUIDITAS			SALES GROWTH		
			TOTAL ASET	TOTAL HUTANG		SALES _t (SEKARANG)	SALES _t (TH LALU)	
1	ADES	2013	441,064	176,286	2.50198	502,524	476,638	5
		2014	504,865	209,066	2.41486	578,784	502,524	15
		2015	653,224	324,855	2.01082	669,725	578,784	16
		2016	767,479	383,091	2.00339	887,663	669,725	33
		2017	840,236	417,225	2.01387	814,490	887,663	-8
2	AGII	2013	2,555,918.000	1,703,256	1.50061	972,105	858,905	13
		2014	3,487,197.000	2,237,721	1.55837	1,098,905	972,105	13
		2015	4,953,451.000	3,074,584	1.61110	1,426,441	1,098,905	30
		2016	5,847,722.000	2,996,929	1.95124	1,651,136	1,426,441	16
		2017	6,403,543.000	2,971,605	2.15491	1,838,417	1,651,136	11
3	AKPI	2013	2,084,567,189	1,055,230,963	1.97546	1,663,385,190	1,509,190,000	10
		2014	2,227,042,590	1,191,196,937	1.86958	1,945,383,031	1,663,385,190	17
		2015	2,883,143,132	1,775,577,239	1.62378	2,017,466,511	1,945,383,031	4
		2016	2,615,909,190	1,495,874,021	1.74875	2,047,218,639	2,017,466,511	1
		2017	2,745,325,833	1,618,713,342	1.69599	2,064,857,643	2,047,218,639	1
4	AMFG	2013	3,539,393	778,666	4.54546	3,216,480	2,857,310	13
		2014	3,918,391	733,749	5.34023	3,672,186	3,216,480	14
		2015	4,270,275	880,052	4.85230	3,665,989	3,672,186	0
		2016	5,504,890	1,905,626	2.88876	3,724,075	3,665,989	2
		2017	6,267,816	2,718,939	2.30524	3,885,791	3,724,075	4
5	APLI	2013	303,594,490,546	85,871,301,621	3.53546	281,551,386,863	343,677,756,488	-13
		2014	273,126,657,794	48,553,666,580	5.62525	294,081,114,204	281,551,386,863	4
		2015	308,620,387,248	87,059,306,497	3.54494	260,667,211,707	294,081,114,204	-1
		2016	382,461,777,452	116,726,057,995	3.27658	347,205,836,259	260,667,211,707	33
		2017	398,698,779,619	171,514,782,371	2.32457	382,238,397,027	347,205,836,259	10
6	ARNA	2013	1,135,244,802,060	366,754,918,531	3.09538	1,417,640,229,330	1,113,663,603,211	27
		2014	1,259,175,442,875	346,944,901,743	3.62932	1,609,758,677,687	1,417,640,229,330	14
		2015	1,430,779,475,454	536,050,998,398	2.66911	1,291,926,384,471	1,609,758,677,687	-20
		2016	1,543,216,299,146	595,128,097,887	2.59308	1,511,978,367,218	1,291,926,384,471	17
		2017	1,601,346,561,573	571,946,769,034	2.79982	1,732,985,361,870	1,511,978,367,218	15
7	ASII	2013	213,994	107,806	1.98499	193,880	188,053	3
		2014	236,029	115,705	2.03992	201,701	193,880	4

		2015	245,435	118,902	2.06418	184,196	201,701	-9
		2016	261,855	121,949	2.14725	181,084	184,196	-2
		2017	295,646	139,317	2.12211	206,057	181,084	14
8	AUTO	2013	12,617,678	3,058,924	4.12487	10,701,988	8,277,485	25
		2014	14,387,568	4,244,862	3.38941	12,255,427	10,701,988	15
		2015	14,339,110	4,195,684	3.41759	11,723,787	12,255,427	-4
		2016	14,612,274	4,075,716	3.58520	12,806,867	11,723,787	9
		2017	14,762,309	4,003,233	3.68760	13,549,857	12,806,867	6
9	BATA	2013	680,685,060	283,831,895	2.39820	902,459,209	751,449,000	20
		2014	774,891,087	345,775,482	2.24102	1,008,727,515	902,459,209	12
		2015	795,257,974	248,070,766	3.20577	1,028,850,578	1,008,727,515	2
		2016	804,742,917	247,587,638	3.25034	999,802,379	1,028,850,578	-3
		2017	855,691,231	276,382,503	3.09604	974,536,083	999,802,379	-3
10	BUDI	2013	2,382,875	1,497,754	1.59097	2,568,964	2,295,400	12
		2014	2,476,982	1,563,631	1.58412	2,284,211	2,568,964	-1
		2015	3,265,953	2,160,702	1.51152	2,378,805	2,284,211	4
		2016	2,931,807	1,766,825	1.65936	2,467,553	2,378,805	4
		2017	2,939,456	1,744,756	1.68474	2,510,578	2,467,553	2
11	CEKA	2013	1,069,627,299,747	541,352,365,829	1.97584	2,531,881,182,546	1,123,519,657,631	12
		2014	1,284,150,037,341	746,598,865,219	1.72000	3,701,868,790,192	2,531,881,182,546	46
		2015	1,485,826,210,015	845,932,695,663	1.75644	3,485,733,830,354	3,701,868,790,192	-6
		2016	1,425,964,152,418	538,044,038,690	2.65027	4,115,541,761,173	3,485,733,830,354	18
		2017	1,392,636,444,501	489,592,257,434	2.84448	4,257,738,486,908	4,115,541,761,173	3
12	DLTA	2013	867,040,802	190,482,809	4.55181	867,066,542	719,951,793	20
		2014	991,947,134	227,473,881	4.36071	879,253,383	867,066,542	1
		2015	1,038,321,916	188,700,435	5.50249	699,506,819	879,253,383	-20
		2016	1,197,796,650	185,422,642	6.45982	774,968,268	699,506,819	11
		2017	1,340,842,765	196,197,372	6.83415	777,308,328	774,968,268	0
13	DPNS	2013	256,372,669,050	32,944,704,261	7.78191	131,333,196,189	146,690,966,909	-10
		2014	268,877,322,944	32,794,800,672	8.19878	132,775,925,237	131,333,196,189	1
		2015	274,483,110,371	33,187,031,327	8.27079	118,475,319,120	132,775,925,237	-1
		2016	296,129,565,784	32,865,162,199	9.01044	115,940,711,050	118,475,319,120	-2
		2017	308,491,173,960	40,655,786,593	7.58788	111,294,849,755	115,940,711,050	-4
14	DVLA	2013	1,190,054,288	275,351,336	4.32195	1,101,684,170	1,087,379,869	0
		2014	1,236,247,525	273,816,042	4.51488	1,103,821,775	1,101,684,170	0
		2015	1,376,278,237	402,760,903	3.41711	1,306,098,136	1,103,821,775	0
		2016	1,531,365,558	451,785,946	3.38958	1,451,356,680	1,306,098,136	0
		2017	1,640,886,147	524,586,078	3.12796	1,575,647,308	1,451,356,680	0
15	EKAD	2013	343,601,504,089	105,893,942,734	3.24477	418,668,758,096	385,037,050,333	9
		2014	411,726,182,748	143,820,128,736	2.86279	526,573,620,057	418,668,758,096	26
		2015	389,691,595,500	97,730,178,889	3.98742	531,537,606,573	526,573,620,057	1
		2016	702,508,630,708	110,503,822,983	6.35732	568,638,832,579	531,537,606,573	7

		2017	796,767,646,172	133,949,920,707	5.94825	643,591,823,505	568,638,832,579	13
16	GGRM	2013	50,770,251	21,353,980	2.37755	55,436,954	49,028,696	13
		2014	58,220,600	24,991,880	2.32958	65,185,850	55,436,954	18
		2015	63,505,413	25,497,504	2.49065	70,365,573	65,185,850	8
		2016	62,951,634	23,387,406	2.69169	76,274,147	70,365,573	8
		2017	66,759,930	24,572,266	2.71688	83,305,925	76,274,147	9
17	HMSP	2013	27,404,594	13,249,559	2.06834	75,025,207	66,626,123	13
		2014	28,380,630	14,882,516	1.90698	80,690,139	75,025,207	8
		2015	38,010,724	5,994,664	6.34076	89,069,306	80,690,139	10
		2016	42,508,277	8,333,263	5.10104	95,466,657	89,069,306	7
		2017	43,141,063	9,028,078	4.77854	99,091,484	95,466,657	4
18	ICBP	2013	21,267,470	8,001,739	2.65786	25,094,681	21,716,900	16
		2014	24,910,211	9,870,264	2.52376	30,022,463	25,094,681	20
		2015	26,560,624	10,173,713	2.61071	31,741,094	30,022,463	6
		2016	28,901,948	10,401,125	2.77873	34,466,069	31,741,094	9
		2017	31,619,514	11,295,184	2.79938	35,606,593	34,466,069	3
19	IGAR	2013	314,746,644,499	89,003,869,709	3.53633	643,403,327,263	556,446,000,000	16
		2014	349,894,783,575	86,443,556,430	4.04767	737,863,227,409	643,403,327,263	15
		2015	383,936,040,590	73,471,782,127	5.22563	677,331,846,043	737,863,227,409	-8
		2016	439,465,673,296	65,716,637,766	6.68728	792,794,834,768	677,331,846,043	17
		2017	513,022,591,574	71,075,842,431	7.21796	761,926,952,217	792,794,834,768	-4
20	INAI	2013	765,881,409,376	639,563,606,250	1.19751	640,702,671,875	582,654,361,422	10
		2014	893,663,745,450	1,330,259,296,537	0.67180	933,462,438,255	640,702,671,875	46
		2015	1,330,259,296,537	1,090,438,393,880	1.21993	1,384,675,922,166	933,462,438,255	48
		2016	1,339,032,413,455	1,081,015,810,782	1.23868	1,284,510,320,664	1,384,675,922,166	-7
		2017	1,213,916,545,120	936,511,874,370	1.29621	980,285,748,450	1,284,510,320,664	-2
21	INCI	2013	136,142,063,219	10,050,376,983	13.54596	81,244,267,131	64,628,362,916	26
		2014	147,992,617,351	10,872,710,103	13.61138	110,023,088,698	81,244,267,131	35
		2015	169,546,066,314	15,494,757,317	10.94215	136,668,408,270	110,023,088,698	24
		2016	269,351,381,344	26,524,918,593	10.15465	176,067,561,639	136,668,408,270	29
		2017	303,788,390,330	35,408,565,186	8.57952	269,706,737,385	176,067,561,639	53
22	INDF	2013	78,092,789	39,719,660	1.96610	57,731,998	50,201,500	15
		2014	85,938,885	44,710,509	1.92212	63,594,452	57,731,998	10
		2015	91,831,526	48,709,933	1.88527	64,061,947	63,594,452	1
		2016	82,174,515	38,233,092	2.14930	66,750,317	64,061,947	4
		2017	87,939,488	41,182,764	2.13535	70,186,618	66,750,317	5
23	INDS	2013	2,196,518,364,473	443,652,749,965	4.95099	1,702,447,098,851	1,476,987,701,603	15
		2014	2,282,666,078,493	459,998,606,660	4.96233	1,866,977,260,105	1,702,447,098,851	10
		2015	2,553,928,346,219	634,889,428,231	4.02263	1,659,505,639,261	1,866,977,260,105	-1
		2016	2,477,272,502,538	409,208,624,907	6.05381	1,637,036,790,119	1,659,505,639,261	-1
		2017	2,434,617,337,849	289,798,419,319	8.40107	1,967,982,902,772	1,637,036,790,119	20
24	INTP	2013	26,607,241	3,629,554	7.33072	18,691,286	17,290,337	8

		2014	28,884,635	4,100,000	7.04503	19,996,264	18,691,286	7
		2015	27,638,360	3,772,410	7.32645	17,798,055	19,996,264	-1
		2016	30,150,580	4,011,877	7.51533	15,361,894	17,798,055	-14
		2017	28,863,676	4,307,169	6.70131	14,431,211	15,361,894	-6
25	ISSP	2013	4,393,577	2,459,118	1.78665	3,534,018	3,092,658	14
		2014	5,443,158	3,138,324	1.73442	3,367,873	3,534,018	-5
		2015	5,448,447	2,894,972	1.88204	3,583,541	3,367,873	6
		2016	6,041,811	3,396,754	1.77870	3,259,200	3,583,541	-9
		2017	6,269,365	3,428,424	1.82864	3,662,810	3,259,200	12
26	JECC	2013	1,239,821,716	1,052,583,258	1.17788	1,490,073,098	1,234,800,000	21
		2014	1,062,476,023	846,116,408	1.25571	1,493,012,114	1,490,073,098	0
		2015	1,358,464,081	990,707,822	1.37121	1,663,335,876	1,493,012,114	11
		2016	1,587,210,576	1,116,872,234	1.42112	2,037,784,842	1,663,335,876	23
		2017	1,927,985,352	1,380,623,870	1.39646	2,184,518,893	2,037,784,842	7
27	JPFA	2013	14,917,590	9,672,368	1.54229	21,412,085	17,833,000	20
		2014	15,730,435	10,440,441	1.50668	24,458,880	21,412,085	14
		2015	17,159,466	11,049,774	1.55292	25,022,913	24,458,880	2
		2016	19,251,026	9,878,062	1.94887	27,063,310	25,022,913	8
		2017	21,088,870	11,293,242	1.86739	29,602,688	27,063,310	9
28	KAEF	2013	2,471,939,548,890	847,584,859,909	2.91645	4,348,073,988,385	3,734,241,101,309	16
		2014	2,968,184,626,297	1,157,040,676,384	2.56532	4,521,024,379,759	4,348,073,988,385	4
		2015	3,434,879,313,034	1,378,319,672,511	2.49208	4,860,371,483,524	4,521,024,379,759	8
		2016	4,612,562,541,064	2,341,155,131,870	1.97021	5,811,502,656,431	4,860,371,483,524	20
		2017	6,096,148,972,534	3,523,628,217,406	1.73008	6,255,312,383,294	5,811,502,656,431	8
29	KBLI	2013	1,337,022	450,372	2.96870	2,572,350,076,614	2,273,197,243,380	13
		2014	1,337,351	396,594	3.37209	2,384,078,038,239	2,572,350,076,614	-7
		2015	1,551,800	524,438	2.95897	2,662,038,531,021	2,384,078,038,239	12
		2016	1,871,422	550,077	3.40210	2,812,196,217,447	2,662,038,531,021	6
		2017	3,013,761	1,227,014	2.45617	3,186,700,000,000	2,812,196,217,447	13
30	KBLM	2013	654,296,256,935	384,632,097,122	1.70110	1,032,787,438,869	1,020,197,000,000	1
		2014	647,249,655,440	356,961,782,298	1.81322	919,537,870,594	1,032,787,438,869	-1
		2015	654,385,717,061	357,910,337,055	1.82835	967,710,339,797	919,537,870,594	5
		2016	639,091,366,917	318,436,989,653	2.00696	987,409,109,474	967,710,339,797	2
		2017	1,235,199,000,000	443,770,000,000	2.78342	1,215,500,000,000	987,409,109,474	23
31	KDSI	2013	850,233,842,186	498,224,954,613	1.70653	1,386,314,584,485	1,301,333,000,000	7
		2014	952,177,443,047	555,679,416,109	1.71354	1,626,232,662,544	1,386,314,584,485	17
		2015	1,177,093,668,866	798,172,379,792	1.47474	1,713,946,192,967	1,626,232,662,544	5
		2016	1,142,273,020,550	722,488,734,446	1.58103	1,995,337,146,834	1,713,946,192,967	16
		2017	1,328,291,727,616	842,752,226,515	1.57614	2,245,519,457,754	1,995,337,146,834	13
32	KLBF	2013	11,315,061,275,026	2,815,103,309,451	4.01941	16,002,131,057,048	13,636,405,178,957	17
		2014	12,425,032,367,729	2,607,556,689,283	4.76501	17,368,532,547,558	16,002,131,057,048	9
		2015	13,696,417,381,439	2,758,131,396,170	4.96583	17,887,464,223,321	17,368,532,547,558	3

		2016	15,226,009,210,657	2,762,162,069,572	5.51235	19,374,230,957,505	17,887,464,223,321	8
		2017	16,616,239,416,335	2,722,207,633,646	6.10396	20,182,120,166,616	19,374,230,957,505	4
33	LION	2013	498,567,897,161	82,783,559,318	6.02255	333,674,349,966	333,922,000,000	0
		2014	605,165,911,239	179,232,241,844	3.37643	377,622,622,150	333,674,349,966	13
		2015	639,330,150,373	184,730,654,202	3.46088	389,251,192,409	377,622,622,150	3
		2016	685,812,995,987	215,209,902,816	3.18672	379,137,149,036	389,251,192,409	-3
		2017	681,937,947,736	229,630,859,719	2.96971	349,690,796,141	379,137,149,036	-8
		34	LMSH	2013	141,697,598,705	31,229,504,329	4.53730	256,210,760,822
2014	141,034,984,628			28,441,933,937	4.95870	249,072,012,369	256,210,760,822	-3
2015	133,782,751,041			21,341,373,897	6.26870	174,598,965,938	249,072,012,369	-36
2016	162,828,169,250			45,511,700,128	3.57772	157,855,084,036	174,598,965,938	-10
2017	161,163,426,840			31,541,423,763	5.10958	224,371,164,551	157,855,084,036	42
35	MERK	2013	696,946,318	184,727,696	3.77283	1,193,952,302	929,876,824	28
		2014	711,055,830	166,811,511	4.26263	863,207,535	1,193,952,302	-29
		2015	641,646,818	168,103,536	3.81697	983,446,471	863,207,535	14
		2016	743,934,894	161,262,425	4.61319	1,034,806,890	983,446,471	5
		2017	847,006,544	231,569,103	3.65768	1,156,648,155	1,034,806,890	12
36	MLBI	2013	1,462,234	707,127	2.06785	2,488,132	1,204,289	10
		2014	2,231,051	1,677,254	1.33018	2,988,501	2,488,132	20
		2015	2,100,853	1,334,373	1.57441	2,696,318	2,988,501	-10
		2016	2,275,038	1,454,398	1.56425	3,263,311	2,696,318	21
		2017	2,510,078	1,445,173	1.73687	3,389,736	3,263,311	4
37	MYOR	2013	9,710,223,454,000	5,816,323,334,823	1.66948	12,017,837,133,337	10,510,625,669,832	14
		2014	10,291,108,029,334	6,190,553,036,545	1.66239	14,169,088,278,238	12,017,837,133,337	18
		2015	11,342,715,686,221	6,148,255,759,034	1.84487	14,818,730,635,847	14,169,088,278,238	5
		2016	12,922,421,859,142	6,657,165,872,077	1.94113	18,349,959,898,358	14,818,730,635,847	24
		2017	14,915,849,800,251	7,561,503,434,179	1.97260	20,616,673,946,473	18,349,959,898,358	12
38	NIPS	2013	798,407,625	562,461,853	1.41949	911,064,069	702,719,255	30
		2014	1,206,854,399	630,960,175	1.91273	1,015,868,035	911,064,069	12
		2015	1,547,720,090	938,717,411	1.64876	987,862,829	1,015,868,035	-3
		2016	1,777,956,390	935,375,496	1.90079	1,039,635,856	987,862,829	5
		2017	1,897,962,447	1,018,449,877	1.86358	1,077,046,664	1,039,635,856	4
39	PYFA	2013	175,118,921,406	184,727,696	947.98411	192,555,731,180	176,730,979,672	9
		2014	172,736,624,689	166,811,511	1035.51981	222,302,407,528	192,555,731,180	15
		2015	159,951,537,229	168,103,536	951.50608	217,843,921,422	222,302,407,528	-2
		2016	167,062,795,608	161,262,425	1035.96851	216,951,583,953	217,843,921,422	0
		2017	159,563,931,041	231,569,103	689.05535	223,002,490,278	216,951,583,953	3
40	RICY	2013	1,109,865,329,758	728,675,060,830	1.52313	984,185,102,135	749,972,702,550	31
		2014	1,170,752,424,106	774,439,342,861	1.51174	1,185,443,580,242	984,185,102,135	20
		2015	1,198,193,867,892	798,114,824,380	1.50128	1,111,051,293,008	1,185,443,580,242	-6
		2016	1,288,683,925,066	876,184,855,001	1.47079	1,221,519,096,811	1,111,051,293,008	10
		2017	1,374,444,788,282	944,179,416,586	1.45570	1,600,432,168,098	1,221,519,096,811	31

41	ROTI	2013	1,822,689,047,108	1,035,351,397,437	1.76045	1,505,519,937,691	1,190,825,893,340	26
		2014	2,142,894,276,216	1,182,771,921,472	1.81176	1,880,262,901,697	1,505,519,937,691	25
		2015	2,706,323,637,034	1,517,788,685,162	1.78307	2,174,501,712,899	1,880,262,901,697	16
		2016	2,919,640,858,718	1,476,889,086,692	1.97689	2,521,920,968,213	2,174,501,712,899	16
		2017	4,559,573,709,411	1,739,467,993,982	2.62125	2,491,100,179,560	2,521,920,968,213	-1
42	SCCO	2013	1,762,032,300,123	1,054,421,170,969	1.67109	3,751,042,310,613	3,642,885,004,273	3
		2014	1,656,007,190,010	841,614,670,129	1.96765	3,703,267,949,291	3,751,042,310,613	-1
		2015	1,773,144,328,632	850,791,824,810	2.08411	3,533,081,041,052	3,703,267,949,291	-5
		2016	2,449,935,491,586	1,229,514,818,362	1.99260	3,742,637,722,322	3,533,081,041,052	6
		2017	4,014,244,589,706	1,286,017,105,712	3.12146	4,440,404,595,541	3,742,637,722,322	19
43	SMBR	2013	2,711,416,335	244,459,581	11.09147	1,168,607,832	1,097,679,986	6
		2014	2,926,360,857	209,113,746	13.99411	1,214,914,932	1,168,607,832	4
		2015	3,268,667,933	319,315,349	10.23648	1,461,248,284	1,214,914,932	20
		2016	4,368,876,996	1,248,119,294	3.50037	1,522,808,093	1,461,248,284	4
		2017	5,060,337,247	1,647,477,388	3.07157	1,551,524,990	1,522,808,093	2
44	SMGR	2013	30,792,884,092	8,988,908,217	3.42565	24,501,240,780	19,598,247,884	25
		2014	30,833,102,777	9,081,620,983	3.39511	26,987,035,135	24,501,240,780	10
		2015	38,153,118,932	10,712,320,531	3.56161	26,948,004,471	26,987,035,135	0
		2016	44,226,895,982	13,652,504,525	3.23947	26,134,306,138	26,948,004,471	-3
		2017	48,963,502,966	18,524,450,664	2.64318	27,813,664,176	26,134,306,138	6
45	SMSM	2013	1,701,103	694,304	2.45008	2,372,982	2,269,289	5
		2014	1,749,395	602,558	2.90328	2,632,860	2,372,982	11
		2015	2,220,108	779,860	2.84680	2,802,924	2,632,860	6
		2016	2,254,740	674,685	3.34192	2,879,876	2,802,924	3
		2017	2,443,341	615,157	3.97190	3,339,964	2,879,876	16
46	SRSN	2013	421,104,664	107,695,369	3.91015	392,315,526	384,145,000	2
		2014	464,949,206	140,918,993	3.29941	472,834,591	392,315,526	21
		2015	574,073,314	233,993,478	2.45337	531,573,325	472,834,591	12
		2016	717,149,704	315,096,071	2.27597	500,539,668	531,573,325	-6
		2017	652,726,454	237,220,555	2.75156	521,481,727	500,539,668	4
47	STAR	2013	749,402,740,231	259,578,391,395	2.88700	274,141,734,113	204,735,375,950	34
		2014	775,917,827,931	285,744,500,913	2.71543	228,622,027,943	274,141,734,113	-17
		2015	729,020,553,284	239,344,544,398	3.04590	258,967,329,940	228,622,027,943	13
		2016	690,187,353,961	200,161,402,637	3.44815	129,480,611,941	258,967,329,940	-56
		2017	614,705,038,056	124,422,750,504	4.94046	114,496,159,735	129,480,611,941	-13
48	TALF	2013	341,414,650,168	69,103,582,862	4.94062	423,277,747,305	362,728,000,000	17
		2014	431,533,296,503	104,951,997,743	4.11172	558,080,193,376	423,277,747,305	32
		2015	434,210,376,664	84,008,353,472	5.16866	476,383,633,793	558,080,193,376	-13
		2016	881,673,021,959	129,777,537,129	6.79373	569,419,992,907	476,383,633,793	20
		2017	921,240,988,517	155,076,156,734	5.94057	646,087,885,410	569,419,992,907	13
49	TCID	2013	1,465,952,460,752	282,961,770,795	5.18074	2,027,899,402,527	1,851,152,825,559	10
		2014	1,853,235,343,636	569,730,901,368	3.25283	2,308,203,551,971	2,027,899,402,527	14

		2015	2,082,096,848,703	367,225,370,670	5.66981	2,314,889,854,074	2,308,203,551,971	0
		2016	2,185,101,038,101	401,942,530,776	5.43635	2,526,776,164,168	2,314,889,854,074	9
		2017	2,361,807,189,430	503,480,853,006	4.69096	2,706,394,847,919	2,526,776,164,168	7
50	TOTO	2013	1,746,177,682,568	710,527,268,893	2.45758	1,711,306,783,682	1,576,763,006,759	9
		2014	2,027,288,693,678	796,096,371,054	2.54654	2,053,630,374,083	1,711,306,783,682	20
		2015	2,439,540,859,205	947,997,940,099	2.57336	2,278,673,871,193	2,053,630,374,083	11
		2016	2,581,440,938,262	1,057,566,418,720	2.44093	2,069,017,634,710	2,278,673,871,193	-9
		2017	2,826,490,815,501	1,132,699,218,954	2.49536	2,171,861,931,164	2,069,017,634,710	5
51	TRIS	2013	475,428,240,024	172,797,615,708	2.75136	709,945,585,382	558,886,515,975	27
		2014	523,900,642,605	214,390,227,222	2.44368	746,828,922,732	709,945,585,382	5
		2015	574,346,433,075	245,138,356,170	2.34295	859,743,472,895	746,828,922,732	15
		2016	639,701,164,511	293,073,984,034	2.18273	901,909,489,240	859,743,472,895	5
		2017	544,968,319,987	188,736,733,204	2.88745	773,806,956,330	901,909,489,240	-14
52	TRST	2013	3,260,919,505,192	1,551,242,364,818	2.10213	2,033,149,367,039	1,949,153,201,410	4
		2014	3,261,285,495,052	1,499,792,311,890	2.17449	2,507,884,797,367	2,033,149,367,039	23
		2015	3,357,359,499,954	1,400,438,809,900	2.39736	2,457,349,444,991	2,507,884,797,367	-2
		2016	3,290,596,224,286	1,358,241,040,272	2.42269	2,249,418,846,803	2,457,349,444,991	-8
		2017	3,332,905,936,010	1,357,336,438,524	2.45548	2,354,938,016,436	2,249,418,846,803	5
53	TSPC	2013	5,407,957,915,805	1,545,006,061,565	3.50028	6,854,889,233,121	6,630,809,553,343	3
		2014	5,592,730,492,960	1,460,391,494,410	3.82961	7,512,115,037,587	6,854,889,233,121	10
		2015	6,284,729,099,203	1,947,588,124,083	3.22693	8,181,481,867,179	7,512,115,037,587	9
		2016	6,585,807,349,438	1,950,534,206,746	3.37641	9,138,238,993,842	8,181,481,867,179	12
		2017	7,434,900,309,021	2,352,891,899,876	3.15990	9,565,462,045,199	9,138,238,993,842	5
54	ULTJ	2013	2,811,620,982,142	796,474,448,056	3.53008	3,460,231,249,075	2,809,851,307,439	23
		2014	2,917,083,567,355	651,985,807,625	4.47415	3,916,789,366,423	3,460,231,249,075	13
		2015	3,539,995,910,248	742,490,216,326	4.76773	4,393,932,684,171	3,916,789,366,423	12
		2016	4,239,199,641,365	749,966,146,582	5.65252	4,685,987,917,355	4,393,932,684,171	7
		2017	5,186,940,000,000	978,185,000,000	5.30262	4,879,559,000,000	4,685,987,917,355	4
55	UNIT	2013	459,118,935,528	217,861,673,225	2.10739	101,886,214,646	88,466,000,000	15
		2014	440,727,374,151	199,073,815,553	2.21389	102,448,044,300	101,886,214,646	1
		2015	460,539,382,206	217,565,067,467	2.11679	118,260,140,704	102,448,044,300	15
		2016	432,913,180,372	188,891,359,540	2.29186	104,109,821,503	118,260,140,704	-12
		2017	426,384,622,878	181,126,294,572	2.35407	103,245,048,266	104,109,821,503	-1
56	UNVR	2013	13,348,188	9,093,518	1.46788	30,757,435	27,303,248	13
		2014	14,280,670	9,681,888	1.47499	34,511,534	30,757,435	12
		2015	15,729,945	10,902,585	1.44277	36,484,030	34,511,534	6
		2016	16,745,695	12,041,437	1.39067	40,053,732	36,484,030	10
		2017	18,906,413	13,733,025	1.37671	41,204,510	40,053,732	3
57	WIIM	2013	1,229,011,260,881	447,651,956,356	2.74546	1,588,022,200,150	1,119,062,225,729	42
		2014	1,332,907,675,785	478,482,577,195	2.78570	1,661,533,200,316	1,588,022,200,150	5
		2015	1,342,700,045,391	398,991,064,485	3.36524	1,839,419,574,956	1,661,533,200,316	11
		2016	1,353,634,132,275	362,540,740,471	3.73374	1,685,795,530,617	1,839,419,574,956	-8

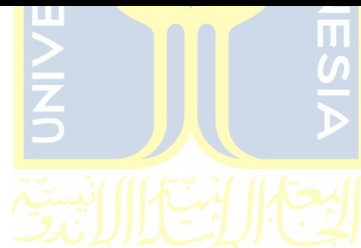
	2017	1,225,712,093,041	247,620,731,930	4.94996	1,476,427,090,781	1,685,795,530,617	-1
--	------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------	----

LAMPIRAN 6

Output Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	280	,2000	1,0000	,407320	,1148817
Kepemilikan Institusional	280	,0211	4,7899	,747963	,5405661
Komite Audit	280	3,0000	5,0000	3,085714	,3049347
Profitabilitas	280	-,0033	,7824	,095196	,1011829
Leverage	280	,0021	10,9269	,882066	1,0441176
Likuiditas	280	,6718	13,9941	3,375442	2,1652570
Sales Growth	280	-,5000	1,2535	,089242	,1589562
Tax Avoidance	280	-1,3411	5,5484	-,189778	,4437482
Valid N (listwise)	280				



Lampiran 7

Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		280
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0362456
	Std. Deviation	,21580665
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,047
Kolmogorov-Smirnov Z		1,322
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 8

Output Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,364	,204		1,787	,075		
	Dewan Komisaris Independen	-,213	,077	-,160	-2,758	,006	,907	1,
	Kepemilikan Institusional	,070	,032	,133	2,161	,032	,810	1,
	Komite Audit	-,524	,152	-,194	-3,449	,001	,965	1,
	Profitabilitas	,472	,194	,144	2,438	,015	,877	1,
	Leverage	-,024	,036	-,068	-,663	,508	,288	3,
	Likuiditas	-,131	,065	-,215	-2,026	,044	,270	3,
	Sales Growth	,345	,132	,151	2,625	,009	,926	1,

a. Dependent Variable: Tax Avoidance



Lampiran 9
Output Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,271	,100		2,715	,007
	Dewan Komisaris Independen	-,065	,038	-,108	-1,735	,084
	Kepemilikan Institusional	-,009	,016	-,037	-,561	,575
	Komite Audit	-,094	,074	-,076	-1,260	,209
	Profitabilitas	-,010	,095	-,007	-,106	,916
	Leverage	-,007	,018	-,042	-,378	,706
	Likuiditas	-,048	,032	-,173	-1,517	,130
	Sales Growth	,078	,064	,075	1,216	,225

a. Dependent Variable: ABS_RES



Lampiran 10

Output Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,413 ^a	,170	,149	,30058

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Likuiditas, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Leverage

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,049	7	,721	7,984	,000 ^b
	Residual	24,575	272	,090		
	Total	29,624	279			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Sales Growth, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Likuiditas, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Leverage



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,364	,204		1,787	,075
	Dewan Komisaris Independen	-,213	,077	-,160	-2,758	,006
	Kepemilikan Institusional	,070	,032	,133	2,161	,032
	Komite Audit	-,524	,152	-,194	-3,449	,001
	Profitabilitas	,472	,194	,144	2,438	,015
	Leverage	-,024	,036	-,068	-,663	,508
	Likuiditas	-,131	,065	-,215	-2,026	,044
	Sales Growth	,345	,132	,151	2,625	,009

a. Dependent Variable: Tax Avoidance